



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN [LKPJ] TAHUN 2021



**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah Pasal 6 ayat 1 yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini memuat beberapa aspek yakni Data Umum Daerah, Pelaksanaan Program dan Kegiatan APBD, Penyelenggaraan Dana Dekonsentrasi yang mencakup Capaian Pelaksanaan Program, outcome program, Capaian Indikator Kinerja Daerah, Permasalahan dan Solusi serta Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran sebelumnya.

Penulisan bahan LKPJ ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran pada seluruh unit kerja dilingkungan Bappeda Provinsi Sumatera Barat sejauh mana keberhasilan dan hambatan yang dihadapi dan upaya penyelesaian yang sudah dilaksanakan selama tahun 2021.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 disusun, mudah-mudahan laporan ini dapat memberi manfaat yang optimal bagi peningkatan kinerja ditahun berikutnya.

Padang, Februari 2021

KEPALA BAPPEDA
PROVINSI SUMATERA BARAT,



MEDI ISWANDI, ST, MM

Pembina Utama Muda,
NIP. 19750502 199903 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PEMBANGUNAN	1
1.2 Data Umum Daerah.....	6
BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN.	38
2.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	38
1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja	38
2. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran	40
2.2. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN	65
2.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA	66
1. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	66
2. Tindak Lanjut Rekomendasi Pansus LKPJ	68
3. Tindak Lanjut Rekomendasi Fraksi	70
2.4. PENGHARGAAN YANG DITERIMA	74
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	76
3.1. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS PEMBANTUAN	76
1. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Diatasnya	76
3.2. HAMBATAN/ PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAANTUGAS PEMBANTUAN DAN UPAYA PENYELESAIAN	79
1. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Diatasnya	79
BAB IV PENUTUP	80

BAB I PENDAHULUAN

1.1. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PEMBANGUNAN

1. VISI

a. Jangka Panjang

Visi pembangunan Provinsi Sumatera Barat yang akan dicapai dua puluh tahun mendatang adalah "Menjadi Provinsi Terkemuka Berbasis Sumber Daya Manusia Yang Agamis Pada Tahun 2025".

b. Jangka Menengah

Berdasarkan visi, misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan daerah, menyelaraskan dengan prioritas pembangunan nasional serta mengakomodir visi, misi, program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih maka visi pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yaitu : "Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat Madani dan Sejahtera".

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Provinsi Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN 2019-2024, dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025.

Sumatera Barat Madani adalah suatu masyarakat yang berperadaban tinggi dan maju yang berbasis pada nilai-nilai, norma hukum, moral yang ditopang oleh keimanan. Masyarakat madani menghormati pluralistis, bersikap terbuka dan demokratis serta selalu bergotong royong menjaga kedaulatan negara. Dengan demikian, masyarakat madani tersebut pada dasarnya adalah masyarakat yang agamais yang ditandai oleh adanya keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, lahir dan batin serta material dan sipiritual.

Sumatera Barat Sejahtera merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi serta hiburan; terciptanya hubungan antar masyarakat yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian, serta tersediannya prasarana dan sarana publik terkait dengan infrastruktur pelayanan publik, transparansi dan teknologi yang mencukupi, nyaman dan terpeliharaan dengan baik.

Pemenuhan kebutuhan dasar rakyat bersifat dinamis, dari waktu ke waktu akan mengalami perubahan sesuai dengan aspirasi dan tuntutan yang berkembang di masyarakat. Untuk itu sarana dan prasarana dalam usaha memenuhi kebutuhan dasar harus terus menerus mengikuti dinamika perubahan, serta dibuka ruang yang seluas-luasnya untuk mencapai kemajuan dan perkembangan bagi kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

2. MISI

a. Jangka Panjang

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah jangka panjang Tahun 2005-2025 sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan kehidupan agama dan budaya berdasarkan filosofi "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah",
- 2) Mewujudkan sistem hukum dan tata pemerintahan yang baik,
- 3) Mewujudkan sumber daya insani yang berkualitas, amanah dan berdaya saing tinggi,
- 4) Mewujudkan usaha ekonomi produktif dan mampu bersaing di dunia global,
- 5) Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik dengan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan.

b. Jangka Menengah

Misi pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan dan dilaksanakan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. Berdasarkan pengertian ini maka misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah".
- 2) Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.
- 3) Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman dan berkualitas tinggi.
- 4) Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah;
- 5) Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

3. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2021

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, maka untuk kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2021 diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan, memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matrik tabel berikut :

Tabel 1.1.
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Provinsi Sumatera Barat

VISI Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera		
MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 1: Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”	1. Meningkatkan pelaksanaan pembangunan mental dan kehidupan masyarakat madani yang aman, damai, tentram, harmonis, beriman dan bertaqwa dengan mengamalkan nilai universal keagamaan dalam kehidupan.	1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat
	2. Penguatan kelembagaan agama dan adat	2. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama, dan kerukunan antar-umat beragama
		3. Berkurangnya penyakit masyarakat (Pekot)
		4. Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat dalam penanganan masalah sosial
		5. Meningkatnya lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan masyarakat
		6. Meningkatnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai adat dan budaya dalam masyarakat.
Misi 2: Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	1. Meningkatkan profesionalitas aparatur pemerintah dan bebas korupsi, kolusi serta nepotisme.	1. Meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur
	2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel	2. Meningkatnya integritas dan kinerja aparatur
		3. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan
	3. Meningkatkan pelayanan publik yang prima, transparans, aspiratif, dan partisipatif	4. Meningkatnya sinergitas antara pelaku pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan
		5. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Misi 3: Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi	1. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkarakter dan cerdas serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan karakter	1. Meningkatnya tingkat pendidikan
		2. Meningkatnya integritas peserta didik

MISI	TUJUAN	SASARAN
	2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan yang dilandasi nilai-nilai agama dan adat	3. Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan
	3. Meningkatkan kompetensi dan daya saing peserta didik serta meningkatkan pengetahuan masyarakat	4. Meningkatnya daya saing lulusan pendidikan menengah untuk masuk perguruan tinggi atau pasar kerja
		5. Meningkatnya minat baca dan budaya membaca
	4. Meningkatkan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju dan tepat guna	6. Meningkatnya fungsi penelitian dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	5. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kualitas kependudukan dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak	7. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara merata
		8. Meningkatnya kualitas kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana
		9. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berolahraga
		10. Meningkatnya kapasitas pemuda dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan
		11. Meningkatnya Pembangunan Gender dan Pemberdayaan Gender serta pemenuhan hak anak.
Misi 4: Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah	1. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkualitas dan lebih merata berbasis ekonomi kerakyatan	1. Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah
	2. Meningkatkan produksi dan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis dan meningkatkan kesejahteraan petani	2. Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan
		3. Meningkatnya usaha pertanian dengan sistem agribisnis
	3. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan kemaritiman secara berkelanjutan	4. Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan
		5. Meningkatnya pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan kemaritiman

MISI	TUJUAN	SASARAN
	4. Menjadikan Sumatera Barat sebagai destinasi utama pariwisata berbasis agama dan budaya	6. Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara
	5. Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal	7. Menurunnya jumlah penduduk miskin
		8. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka
		9. Menuntaskan penanganan daerah tertinggal
		10. Menurunnya tingkat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Misi 5: Meningkatkan Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	1. Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah	1. Meningkatnya kualitas jalan Provinsi
		2. Meningkatnya pelayanan perhubungan/transportasi
		3. Meningkatnya keselamatan lalu lintas
		4. Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya air
		5. Meningkatnya ketersediaan prasarana umum pada kawasan pemukiman/ perumahan, bangunan dan lingkungan
		6. Meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT)
	2. Meningkatkan Pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan	7. Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan tata ruang
		8. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
		9. Terpeliharanya fungsi ekosistem dan kualitas lahan
	3. Meningkatkan budaya dan perilaku masyarakat yang tanggap bencana	10. Berkurangnya resiko bencana
		11. Meningkatnya penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah/daerah pasca bencana
	4. Meningkatkan kualitas kawasan konservasi dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan	12. Terpeliharanya debit sungai
		13. Meningkatnya kualitas ekosistem pesisir dan laut

Tujuan dan sasaran Misi Pertama, **“Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah” Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah**” terkait dengan isu strategis Pembangunan Mental dan Peningkatan Pengamalan Nilai-Nilai Adat dan Agama.

Tujuan Misi Pertama diwujudkan dengan pencapaian sasaran yang diukur dengan implementasi pemahaman dan pengamalan keagamaan dan budaya yang baik akan melahirkan pengamalan agama dan budaya yang baik pula. Untuk sasaran penerapan nilai-nilai agama dan budaya, diperlukan keselarasan antara tujuan, sasaran dengan program-program budaya yang lebih memfokuskan pada penerapan nilai-nilai ABS-SBK ke dalam perilaku masyarakat Sumatera Barat.

Tujuan dan sasaran Misi Kedua, **“Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional”** terkait dengan isu strategis Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, yang sangat penting untuk mendorong proses pembangunan daerah di Sumatera Barat, dan terkait pula dengan isu Pelaksanaan Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan dan peranan pemerintah daerah yang semakin besar dalam menggerakkan proses pembangunan daerah.

Tujuan dan sasaran Misi Ketiga, **“Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berakarakter, dan berkualitas tinggi”** terkait dengan isu strategis Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan isu strategis tentang jiwa dan semangat kewirausahaan yang cukup tinggi dan ulet masyarakat Sumatera Barat.

Tujuan dan sasaran Misi Keempat, **“Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pembangunan daerah”** terkait dengan isu strategis daya beli masyarakat, daya saing daerah untuk menghadapi globalisasi, akses dengan daerah tetangga, prasarana dan sarana daerah, daerah tertinggal dan ketimpangan pembangunan serta dukungan pemerintah pusat.

Tujuan dan sasaran Misi Kelima, **“Meningkatkan Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan”** terkait dengan isu strategis bencana alam dan kualitas lingkungan hidup.

Sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJMD tersebut yang difokuskan dalam pencapaian Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan dengan memperhatikan dampak dari pandemic Covid-19 yang mengakibatkan pelemahan ekonomi nasional dan Sumatera Barat berdasarkan capaian Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I Tahun 2020, ketidakpastian penyelesaian akan wabah Covid-19 baik ditingkat global maupun domestik, serta dukungan terhadap pencapaian Tema dan Fokus Pembangunan RKP Tahun 2021, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengintegrasikan menjadi Tema Provinsi Sumatera Barat : **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial untuk Sumber Daya Manusia Berkualitas”**

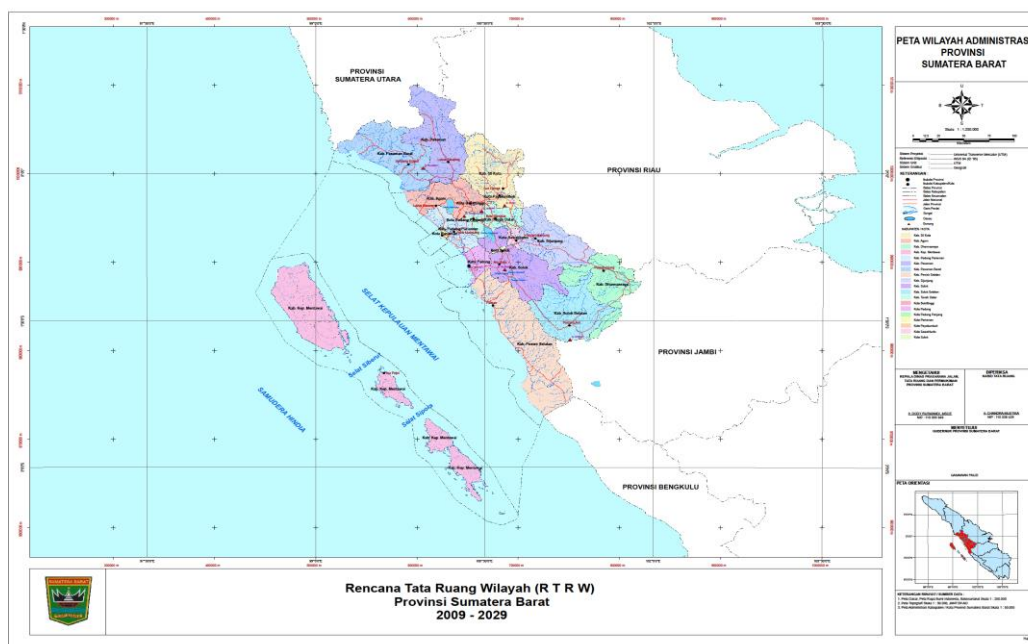
1.2. Data Umum Daerah

1. Kondisi Geografis

Secara geografis, Provinsi Sumatera Barat terletak antara 98° 36’-101° 53’ Bujur Timur dan 0° 54’ Lintang Utara sampai dengan 3° 30’ Lintang Selatan, dengan luas daratan $\pm 42.297,30 \text{ Km}^2$ dan luas perairan (laut) $\pm 52.882,42 \text{ Km}^2$ dengan panjang garis pantai

wilayah daratan $\pm$ 375 Km ditambah panjang garis pantai Kepulauan Mentawai $\pm$ 1.003 Km sehingga total garis pantai keseluruhan $\pm$ 1.378 Km. Perairan laut ini memiliki 180 pulau-pulau besar dan kecil. Secara administratif, Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 19 kabupaten/kota (12 kabupaten dan 7 kota) yang mempunyai 179 kecamatan dengan 245 kelurahan, 759 nagari dan 126 desa dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara dengan Provinsi Sumatera Utara, sebelah timur dengan Provinsi Riau dan Jambi, sebelah selatan dengan Provinsi Bengkulu, dan sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia. Peta administrasi Provinsi Sumatera Barat seperti Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Peta Administrasi Provinsi Sumatera Barat



Sumber : RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009-2029

Sumatera Barat berdasarkan letak geografisnya tepat dilalui garis khatulistiwa (garis lintang nol derajat) tepatnya di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman. Karena itu Sumatera Barat mempunyai iklim tropis dengan rata-rata suhu udara $25,78^{\circ}\text{C}$ dan rata-rata kelembaban yang tinggi yaitu 86,67% dengan tekanan udara rata-rata berkisar 994,69 mb. Pengaruh letak ini, maka menurut ketinggiannya, wilayah di Provinsi Sumatera Barat sangat bervariasi mulai dari dataran rendah di pantai dengan ketinggian 0 m hingga dataran tinggi (pegunungan) dengan ketinggian > 3000 m di atas permukaan laut (dpl). Luas areal yang mempunyai ketinggian 0 sampai 100 m dpl meliputi 1.286.793 ha (30,41%), daerah dengan ketinggian 100 – 500 m dpl mencapai 643.552 ha (15,21%), antara 500 – 1.000 m dpl seluas 1.357.045 ha (32,07%), antara 1.000 – 1.500 m dpl terdapat 767.117 ha (18,13%), daerah dengan ketinggian 1.500 – 2.000 m dpl tercatat 113.116,6 Ha (2,67%), dan sisanya daerah dengan ketinggian di atas 2.500 m dpl.

Dengan kondisi topografi tersebut di atas, potensi sumberdaya alam yang terdapat di Sumatera Barat memiliki berbagai variasi intensitas dan penggunaannya. Pada dataran

rendah intensitas penggunaan lahan dapat lebih maksimal, sementara itu pada dataran tinggi intensitas penggunaannya akan dihadapkan pada faktor pembatas lahan. Untuk itu diharapkan pemanfaatan lahan agar dapat dikelola secara optimal, harus terlebih dahulu secara seksama memperhatikan kondisi lahan dengan tidak mengabaikan dampak lingkungan, sehingga tidak terjadi kerusakan berdampak negatif untuk masa kini dan yang akan datang. Dataran tinggi di wilayah Sumatera Barat sebagian besar merupakan jajaran perbukitan dan pegunungan termasuk rantai Pegunungan Bukit Barisan yang membentang dari utara hingga selatan Pulau Sumatera. Lahan yang ada pada kawasan perbukitan dan pegunungan tersebut dengan kelerengan di atas 40% tercatat 1.017.000 Ha.

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki tatanan geologi kompleks. Kondisi ini disebabkan letaknya yang berbeda pada daerah tumbukan dua lempeng tektonik besar yaitu lempeng Indo-Australia di bagian selatan dan lempeng Euroasia di bagian utara yang ditandai dengan terdapatnya pusat-pusat gerakan tektonik di Kepulauan Mentawai dan sekitarnya. Akibat tumbukan kedua lempeng besar ini selanjutnya muncul gejala tektonik lainnya yaitu busur magmatik yang ditandai dengan munculnya rangkaian pegunungan Bukit Barisan beserta gunung apinya dan sesar/patahan besar Sumatera yang memanjang searah dengan zona tumbukan kedua lempeng yaitu utara-selatan.

Pada sisi lain, tatanan geologi ini berdampak positif bagi Provinsi Sumatera Barat. Dampak positif tersebut berupa munculnya mineral-mineral berharga seperti emas, perak, bijih besi, mangan, timah hitam, obsidian dan lain-lain; tanah yang subur dan banyak sumber air bersih maupun air panas yang berasal dari kawasan geomorfologi struktural namun dekat dengan sumber panas bumi yang berasal dari magma dangkal. Dengan demikian Sumatera Barat merupakan provinsi yang mempunyai potensi sumber daya alam yang memadai untuk dieksploitasi bagi pembangunan.

Struktur geologi yang berkembang adalah struktur perlipatan (antiklinorium) dan struktur sesar dengan arah umum barat laut – tenggara, yang mengikuti struktur regional Pulau Sumatera. Struktur yang terdapat berupa Great Sumatera Fault di sepanjang pesisir barat Pulau Sumatera dan Mentawai Fault di Kepulauan Mentawai yang saling mendesak sehingga terjadi gerakan di lempeng besar dan *micro plate*. Selain geologi dasar laut, di daratan terdapat patahan semangka yang membujur dari Solok Selatan sampai Pasaman. Kondisi ini menjadikan Provinsi Sumatera Barat memiliki kerawanan bencana gempa bumi yang tinggi.

2. Kondisi Demografi

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk dan Sensus Penduduk, jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 sebanyak 5.610.859 jiwa, mengalami peningkatan sebanyak 351.331 jiwa dibandingkan jumlah penduduk pada tahun 2016 yaitu 5.259.528 jiwa.

Aspek kependudukan merupakan hal paling mendasar dalam pembangunan, yang secara universal penduduk merupakan pelaku dan sasaran pembangunan sekaligus yang menikmati hasil pembangunan, maka kualitas penduduk perlu ditingkatkan dan pertumbuhan serta mobilitasnya harus dikendalikan.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Sumatera Barat Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2016 – 2021

KABUPATEN /KOTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kep.Mentawai	85.295	86.981	88.692	90.373	92.021	87.623	96.893
Pesisir Selatan	450.186	453.822	457.285	460.716	463.923	504.418	472.882
Solok	363.684	366.213	368.691	371.105	373.414	391.497	379.757
Sijunjung	222.512	226.300	230.104	233.810	237.376	235.045	248.124
Tanah Datar	344.828	345.706	346.578	347.407	348.219	371.704	349.829
Padang Pariaman	406.076	408.612	411.003	413.272	415.613	430.626	421.579
Agam	476.881	480.722	484.288	487.914	491.282	529.138	500.774
Lima Puluh Kota	368.985	372.568	376.072	379.514	382.817	383.525	391.813
Pasaman	269.883	272.804	275.728	278.480	281.211	299.851	288.982
Solok Selatan	159.796	162.724	165.603	168.411	171.075	182.027	179.184
Dharmasraya	223.112	229.313	235.476	241.571	247.579	288.591	265.841
Pasaman Barat	410.307	418.785	427.295	435.612	443.722	431.672	467.876
Padang	902.413	914.968	927.011	939.112	950.871	909.040	984.490
Solok	66.106	67.307	68.602	69.776	71.010	73.438	74.418
Sawahlunto	60.186	60.778	61.398	61.898	62.524	65.138	63.922
Padang Panjang	50.883	51.712	52.422	52.994	53.693	56.311	55.633
Bukittinggi	122.621	124.715	126.804	128.783	130.773	121.028	136.468
Payakumbuh	127.826	129.807	131.819	133.703	135.573	139.576	141.147
Pariaman	84.709	85.691	86.618	87.626	88.501	94.224	91.247
SUMBAR	5.196.289	5.259.528	5.321.489	5.382.077	5.441.197	5.534.472	5.610.859

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat 2015-2025 Hasil SUPAS2015, BPS

Jumlah penduduk Sumatera Barat Tahun 2020 yang dihitung berdasarkan kepemilikan KTP-el tahun 2020 adalah sebesar 96,25% dari total wajib KTP yang ada, dimana kepemilikan KTP-el tertinggi berada di Kota Bukittinggi dengan capaian 99,94% dan terendah berada di Kabupaten Solok Selatan dengan capaian baru 88,85%, Capaian kepemilikan KTP-el untuk Kota secara umum lebih tinggi dibandingkan Kabupaten, hal ini dapat dipahami karena jumlah penduduk dan cakupan wilayah Kota lebih kecil dibandingkan Kabupaten. Bila dibandingkan dengan capaian kepemilikan KTP-el tahun 2019 yang sebesar 95,19% terjadi progres kenaikan capaian Kepemilikan KTP-el sebesar 1,06% pada tahun 2020.

Tabel 1.3
Kepemilikan KTP-el Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2020

NO	KABUPATEN/ KOTA	PENDUDUK		
		Wajib KTP	Kepemilikan KTP-el (jiwa)	%
KABUPATEN				
1	Pesisir Selatan	360.406	351.166	97,44%
2	Solok	272.132	267.594	98,33%
3	Sijunjung	166.419	153.753	92,39%
4	Tanah Datar	279.152	263.833	94,51%

5	Padang Pariaman	305.319	301.296	98,68%
6	Agam	391.049	359.215	91,86%
7	Lima Puluh Kota	278.448	274.060	98,42%
8	Pasaman	205.929	196.689	95,51%
9	Kep. Mentawai	59.159	57.255	96,78%
10	Dharmasraya	152.911	149.314	97,65%
11	Solok Selatan	128.153	113.866	88,85%
12	Pasaman Barat	292.892	277.115	94,61%
KOTA				
13	Padang	652.823	635.095	97,28%
14	Solok	51.389	51.313	99,85%
15	Sawahlunto	47.997	46.824	97,56%
16	Padang Panjang	41.040	40.985	99,87%
17	Bukittinggi	88.327	88.277	99,94%
18	Payakumbuh	97.979	97.477	99,49%
19	Pariaman	67.032	65.592	97,85%
Sumatera Barat		3.938.556	3.790.719	96,25%

Sumber Data : Dinas, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat 2020

Sedangkan jumlah penduduk Sumatera Barat Tahun 2021 yang dihitung berdasarkan e-KTP adalah sebanyak 3.863.102 jiwa dengan rincian penduduk menurut jumlah laki-laki sebanyak 1.906.355 orang dan penduduk perempuan sebanyak 1.956.747 orang, dengan sebaran sebagai berikut :

Tabel 1.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan e-KTP Tahun 2021

NO	KABUPATEN/ KOTA	PENDUDUK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
KABUPATEN				
1	Kep. Mentawai	30.824	28.719	59.543
2	Pesisir Selatan	175.319	180.635	355.954
3	Solok	135.190	138.161	273.351
4	Sijunjung	78.416	79.681	158.097
5	Tanah Datar	131.450	136.587	268.037
6	Padang Pariaman	151.676	157.248	308.924
7	Agam	178.027	184.135	362.162
8	Lima Puluh Kota	135.079	140.976	276.055
9	Pasaman	99.326	102.365	201.691
10	Solok Selatan	58.915	58.620	117.535
11	Dharmasraya	78.705	77.874	156.579
12	Pasaman Barat	139.875	143.429	283.304
KOTA				
13	Padang	316.741	316.741	633.482
14	Solok	26.052	26.052	52.104
15	Sawahlunto	23.359	23.359	46.718
16	Padang Panjang	20.667	20.667	41.334
17	Bukittinggi	44.847	44.847	89.694

18	Payakumbuh	48.554	48.554	97.108
19	19. Pariaman	33.333	33.333	66.666
Sumatera Barat		1.906.355	1.941.983	3.848.338

3. Kondisi Kemiskinan

Perubahan jumlah dan persentase penduduk miskin tidak akan terlepas dari perubahan nilai garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) merupakan rata-rata pengeluaran perkapita per-bulan yang digunakan untuk mengklarifikasikan penduduk ke dalam golongan miskin atau tidak miskin.

Garis kemiskinan yang digunakan untuk menghitung penduduk miskin September 2021 adalah Rp579.545,- (kapita/bulan). Selama periode Maret 2021–September 2021, Garis Kemiskinan naik sebesar 1,91 persen. Kenaikannya dari Rp568.703,- perkapita per bulan pada Maret 2021 menjadi Rp579.545,- perkapita per bulan pada September 2021. Sementara pada periode September 2020–September 2021, Garis Kemiskinan naik sebesar 5,90 persen, yaitu dari Rp547.240,- perkapita per bulan pada September 2020 menjadi Rp579.545,- per kapita per bulan pada September 2021. Jika dibandingkan antara Maret 2021 dengan September 2021, maka garis kemiskinan daerah perkotaan meningkat sebesar 1,96 persen. Sedangkan di daerah perdesaan meningkat 1,81 persen.

Peran komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan komoditi non makanan. Pada bulan September 2021, sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan sebesar 75,63 persen. Jika dibedakan menurut daerah perkotaan dan perdesaan maka sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan diperdesaan sebesar 78,54 persen, lebih besar dibandingkan daerah perkotaan yang hanya 72,77 persen.

Tabel 1.5
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Menurut Daerah di Provinsi Sumatera Barat
Kondisi Maret 2015 – Maret 2021

TAHUN	GARIS KEMISKINAN (RP/KAPITA/BULAN)			JUMLAH PENDUDUK MISKIN (JIWA)	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN
	MAKANAN	NON MAKANAN	TOTAL		
PERKOTAAN					
Maret 2015	288.410	117.925	406.335	118.034	5,73
Sept 2015	301.356	121.984	423.339	118.481	5,73
Maret 2016	312.154	129.369	441.523	118.962	5,54
Sept 2016	322.168	132.506	454.674	119.510	5,52
Maret 2017	337.132	135.481	472.614	113.010	5,14
Sept 2017	339.339	136.026	475.365	114.590	5,11
Maret 2018	356.907	139.235	496.142	114.840	4,86
Sept 2018	367.319	140.238	507.557	125.580	4,99
Maret 2019	382.490	143.519	526.008	121.350	4,76
Sept 2019	402.124	149.242	551.366	120.580	4,71
Maret 2020	411.369	151.198	562.567	128.120	4,97

TAHUN	GARIS KEMISKINAN (RP/KAPITA/BULAN)			JUMLAH PENDUDUK MISKIN (JIWA)	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN
	MAKANAN	NON MAKANAN	TOTAL		
Sept 2020	413.073	152.458	565.531	141.310	5,22
Maret 2021	424.106	156.831	580.937	145.580	5,30
Sept 2021	431.008	161.294	592.302	134.530	4,83
PEDESAAN					
Maret 2015	293.768	75.985	369.753	261.575	8,35
Sept 2015	313.294	77.884	391.178	231.481	7,35
Maret 2016	332.415	81.375	413.790	252.590	8,16
Sept 2016	341.816	83.703	425.520	257.000	8,27
Maret 2017	352.878	86.342	439.220	251.500	8,10
Sept 2017	354.770	86.644	441.415	245.410	7,94
Maret 2018	369.087	91.162	460.249	242.290	8,07
Sept 2018	370.529	95.901	466.430	227.660	7,90
Maret 2019	382.217	101.722	483.939	226.870	7,88
Sept 2019	401.904	108.552	510.457	222.510	7,69
Maret 2020	415.694	112.136	527.830	216.119	7,43
Sept 2020	416.419	113.254	529.673	223.470	7,83
Maret 2021	438.205	117.976	556.181	225.090	7,91
Sept 2021	444.693	121.531	566.224	205.390	7,23
KOTA + DESA					
Maret 2015	291.641	92.637	384.277	379.609	7,31
Sept 2015	308.554	95.393	403.947	349.530	6,71
Maret 2016	326.993	98.148	425.141	371.555	7,09
Sept 2016	334.358	103.717	438.075	376.510	7,14
Maret 2017	346.896	106.715	453.611	364.510	6,87
Sept 2017	348.429	107.368	455.797	359.990	6,75
Maret 2018	364.235	112.319	476.554	357.130	6,65
Sept 2018	369.207	116.426	485.633	353.240	6,55
Maret 2019	382.233	121.319	503.652	348.220	6,42
Sept 2019	402.003	127.697	529.700	343.090	6,29
Maret 2020	413.832	130.483	544.315	344.230	6,28
Sept 2020	414.949	132.292	547.240	364.790	6,56
Maret 2021	431.644	137.059	568.703	370.670	6,63
Sept 2021	438.308	141.237	579.545	339.930	6,04

Sumber Data : Berita Resmi Statistik No. 05/01/13/Th. XXV, 17 Januari 2022

Berdasarkan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi Sumatera Barat, yang dirilis dalam Berita Resmi Statistik Nomor No. 38/07/13/Th. XXIV, 15 Juli 2021, dimana Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Gil penghitungan konsisten dan terbanding dari waktu ke waktu (apple to apple). Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat pada September 2021 mencapai 339,93 ribu orang (6,04 persen), berkurang sebesar 30,74 ribu orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2021 yang sebesar 370,67 ribu orang. Terjadi penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentasenya. Berdasarkan daerah tempat tinggal, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2021 sebesar 5,30 persen turun menjadi 4,83 persen pada September 2021. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2021 sebesar 7,91 persen turun menjadi 7,23 persen pada September 2021.

Secara umum, pada periode Maret 2013–September 2021, tingkat kemiskinan di Sumatera Barat mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, perkecualian pada Maret 2015, Maret 2016, September 2016, September 2020 dan Maret 2021. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode September 2020 dan Maret 2021 disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia termasuk Sumatera Barat. Dilihat dari Maret 2021 ke September 2021 terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 6,63% menjadi 6,04%.

Tabel 1.6
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Barat
Maret 2015 – September 2021

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)			Persentase Penduduk Miskin		
	Perkotaan	Perdesaan	Jumlah	Perkotaan	Perdesaan	Jumlah
Maret 2015	118.034	261.575	379.609	5,73	8,35	7,31
Sept 2015	118.481	231.048	349.529	5,73	7,35	6,71
Maret 2016	118.962	252.593	371.555	5,54	8,16	7,69
Sept 2016	119.510	257.000	376.510	5,52	8,27	7,14
Maret 2017	113.010	251.500	364.510	5,14	8,1	6,87
Sept 2017	114.590	245.410	359.990	5,11	7,94	6,75
Maret 2018	114.840	242.290	357.130	4,86	8,07	6,55
Sept 2018	125.580	227.660	353.240	4,99	7,90	6,55
Maret 2019	121.350	226.870	348.220	4,76	7,88	6,42
Sept 2019	120.580	222.510	343.090	4,71	7,69	6,29
Maret 2020	128.120	216.110	344.230	4,97	7,43	6,28
Sept 2020	141.310	223.470	364.790	5,22	7,83	6,56
Maret 2021	145.580	225.090	370.670	5,30	7,91	6,63
Sept 2021	134.530	205.390	339.930	4,83	7,23	6,04

Sumber Data : Berita Resmi Statistik No. 05/01/13/Th. XXV, 17 Januari 2022

Dimensi lain yang perlu juga mendapatkan perhatian selain jumlah dan persentase penduduk miskin adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Upaya pengentasan kemiskinan bukan hanya ditujukan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, namun juga mengurangi keparahan dan kedalaman kemiskinan. Indeks kedalaman

kemiskinan (P1) memberikan gambaran seberapa jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin relatif terhadap garis kemiskinan. Penurunan pada P1 mengindikasikan adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan (P2) mengilustrasikan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin. Indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan di Sumatera Barat dapat terlihat pada tabel 1.5 berikut ini.

Tabel 1.7
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2)

TAHUN	KOTA	DESA	KOTA+DESA
P1			
Maret 2015	0,785	1,104	0,977
September 2015	1,056	1,392	1,259
Maret 2016	0,752	1,334	1,096
September 2016	1,038	1,180	1,122
Maret 2017	0,752	1,175	1,000
September 2017	0,599	1,275	0,990
Maret 2018	0,663	1,329	1,035
Sept 2018	0,884	1,025	0,959
Maret 2019	0,771	1,093	0,942
Sept 2019	0,538	0,993	0,779
Maret 2020	0,742	1,068	0,915
Sept 2020	0,803	1,171	0,992
Maret 2021	0,866	1,214	1,043
September 2021	0,742	1,177	0,962
P2			
Maret 2015	0,161	0,224	0,211
September 2015	0,245	0,320	0,290
Maret 2016	0,153	0,304	0,242
September 2016	0,249	0,299	0,278
Maret 2017	0,157	0,278	0,228
September 2017	0,107	0,324	0,233
Maret 2018	0,142	0,320	0,242
Sept 2018	0,212	0,214	0,213
Maret 2019	0,196	0,225	0,211
Sept 2019	0,096	0,191	0,147
Maret 2020	0,164	0,223	0,201
Sept 2020	0,242	0,278	0,261
Maret 2021	0,199	0,282	0,241
September 2021	0,141	0,308	0,225

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

Pada periode Maret 2021 - September 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2021 adalah 1,043 turun 0,081 poin menjadi 0,962 pada September 2021.

Indeks Kearifan Kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,016 dari 0,241 pada Maret 2021 menjadi 0,225 pada September 2021.

Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Kearifan Kemiskinan (P2) di daerah perdesaan lebih tinggi daripada di daerah perkotaan. Pada September 2021, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk daerah perkotaan sebesar 0,742 sementara di daerah perdesaan lebih tinggi, yaitu mencapai 1,177, nilai ini menunjukkan bahwa penduduk miskin di perdesaan memiliki rata-rata (gap) pengeluaran dengan garis kemiskinan yang lebih besar dibandingkan penduduk miskin perkotaan. Kondisi penduduk miskin di perkotaan sedikit lebih baik, dilihat dari nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) yang lebih kecil dibanding penduduk perdesaan. Artinya, diperlukan usaha yang lebih besar untuk mengentaskan penduduk perdesaan dari kemiskinan daripada di perkotaan. Secara umum, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan dari Maret 2021 ke September 2021.

Indeks Kearifan Kemiskinan (P2) mengindikasikan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin. Di perdesaan, nilai indeks ini masih lebih tinggi di banding di perkotaan. Pada September 2021, nilai Indeks Kearifan Kemiskinan (P2) perdesaan sebesar 0,308 dibandingkan perkotaan 0,141 di periode yang sama. Terjadi kenaikan indeks keparahan kemiskinan di perdesaan sebesar 0,026 poin yakni dari 0,282 pada Maret 2021 menjadi 0,308 pada September 2021.

4. Kondisi Ketenagakerjaan

Berdasarkan Berita Resmi Statistik No.59/11/13/Th. XXIV, 05 November 2021, yang diterbitkan Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, keadaan ketenagakerjaan di Sumatera Barat, Jumlah angkatan kerja Sumatera Barat pada Agustus 2021 sebanyak 2,76 juta orang, turun 10,74 ribu orang dibanding Agustus 2020. Sejalan dengan penurunan jumlah Angkatan Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga turun sebesar 1,29 persen poin. „ Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2021 sebesar 6,52 persen, turun 0,36 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2020. „

Penduduk yang bekerja sebanyak 2,58 juta orang, hampir sama dengan Agustus 2020. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah Sektor Perdagangan Besar& Eceran; Reparasi & Perawatan Mobil & Sepeda motor (0,83 persen poin). Sementara sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu Sektor Pertanian, kehutanan & Perikanan (1,52 persen poin). „ Sebanyak 1,67 juta orang (64,77 persen) bekerja pada kegiatan informal, turun 1,51 persen poin dibanding Agustus 2020.

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Sumatera Barat. Penduduk usia kerja pada Agustus 2021 sebanyak 4,08 juta orang, naik sebanyak 30,19 ribu orang dibanding Februari 2021 dan naik sebanyak 60,85 ribu orang jika dibanding Agustus 2020. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 2,76 juta orang (67,72 persen), sisanya termasuk bukan angkatan kerja.

Sejalan dengan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mempunyai pola yang sama. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia

kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. TPAK pada Agustus 2021 sebesar 67,72 persen, turun 1,29 persen poin dibanding Agustus 2020, dan turun 0,68 persen poin dibandingkan Februari 2021. Berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki sebesar 80,67 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 55,04 persen. Apabila dibandingkan Agustus 2020, baik TPAK laki-laki maupun TPAK perempuan mengalami penurunan. Demikian juga jika dibandingkan dengan Februari 2021, TPAK baik laki-laki dan perempuan mengalami penurunan.

Tabel 1.8
Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama
Februari 2020 – Agustus 2021

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Februari 2020	Agustus 2020	Februari 2021	Agustus 2021	Perubahan Agus 2020– Agus 2021	
	Ribu Orang				Orang	Persen
Penduduk Usia Kerja	3 986,24	4 016,78	4 047,44	4 077,63	60,85	1,51
Angkatan Kerja	2 900,09	2 772,13	2 768,67	2 761,39	-10,74	-0,39
Bekerja	2 747,82	2 581,52	2 584,12	2 581,44	-0,08	0,06
Pengangguran	152,27	190,61	184,56	179,95	-10,66	-5,59
Bukan Angkatan Kerja	1 086,16	1 244,64	1 278,77	1 316,24	71,59	5,75
Persen					Persen poin	
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,25	6,88	6,67	6,52	-0,36	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	72,75	69,01	68,41	67,72	-1,29	

Sumber : Berita Resmi Statistik No.59/11/13/Th. XXIV, 05 November 2021

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja untuk masing-masing sektor. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2021, tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu sebesar 34,70 persen; Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 19,93 persen; dan Industri Pengolahan sebesar 8,95 persen. Dominasi lapangan pekerjaan ini dalam menyerap tenaga kerja masih sama baik untuk Agustus 2020 maupun Februari 2021.

Tiga kategori lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja terbesar jika dibandingkan dengan Agustus 2020 adalah Perdagangan Besar dan Eceran (0,83 persen poin); Jasa Pendidikan (0,44 persen poin); dan Jasa Profesional dan Perusahaan (0,38 persen poin). Sementara tiga lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja paling besar adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (1,52 persen poin); Industri Pengolahan (0,51 persen poin); dan Jasa Lainnya (0,39 persen poin).

Apabila dibandingkan dengan Februari 2021, tiga lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (1,18 persen poin); Konstruksi (0,71 persen poin); dan Pertambangan dan Penggalian (0,42 persen poin). Sementara tiga lapangan pekerjaan yang mengalami

penurunan terbesar adalah Perdagangan Besar dan Eceran (1,71 persen poin); Industri Pengolahan (0,77 persen poin); Administrasi Pemerintahan (0,44 persen poin).

Tabel 1.9
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja
Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Kondisi Februari 2020– Agustus 2021
Di Provinsi Sumatera Barat

No	Status Pekerjaan Utama	Februari 2020		Agustus 2020		Februari 2021		Agustus 2021	
		(Ribuan Orang)	%	(Ribuan Orang)	%	(Ribuan Orang)	%	(Ribuan Orang)	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	903,556	32,88	935,13	36,22	865,99	33,51	895,67	34,70
2	Pertambangan dan Penggalian	25,567	0,93	32,56	1,26	17,05	0,66	27,80	1,08
3	Industri Pengolahan	251,357	9,15	244,09	9,46	251,10	9,72	231,07	8,95
4	Pengadaan Listrik, Gas, dan Air Minum	16,87	0,61	9,11	0,35	11,64	0,45	9,27	0,36
5	Konstruksi	132,705	4,83	131,27	5,08	113,90	4,41	132,23	5,12
6	Perdagangan Besar dan Eceran	551,463	20,07	493,16	19,1	559,25	21,64	514,51	19,93
7	Transportasi dan Pergudangan	92,638	3,37	76,52	2,96	79,29	3,07	78,28	3,03
8	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	198,704	7,23	189,21	7,33	185,90	7,19	192,10	7,44
9	Informasi dan Komunikasi	19,307	0,70	14,52	0,56	18,57	0,72	15,71	0,61
10	Jasa Keuangan, Asuransi dan Real Estat	30,392	1,11	23,78	0,92	18,92	0,73	27,07	0,73
11	Jasa Perusahaan	28,041	1,02	19,03	0,74	36,77	1,42	28,97	1,12
12	Administrasi Pemerintahan	191,153	6,96	125,21	4,85	140,53	5,44	129,05	5,00
13	Jasa Pendidikan	175,067	6,37	157,92	6,12	159,42	6,17	169,27	6,56
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	57,093	2,08	47,93	1,86	56,43	2,18	58,39	2,26
15	Jasa Lainnya	73,907	2,69	82,11	3,18	69,35	2,68	72,05	2,79
TOTAL		2 747,82	100,00	2 581,52	100,00	2 584,12	100,00	2 581,44	100,00

Sumber : Berita Resmi Statistik No.59/11/13/Th. XXIV, 05 November 2021

Pada Agustus 2021, penduduk bekerja paling banyak berstatus buruh/karyawan/pegawai yaitu sebesar 31,80 persen, sementara yang paling sedikit berstatus berusaha dibantu buruh tetap/dibayar yaitu sebesar 3,43 persen. Dibandingkan Agustus 2020, status pekerjaan yang mengalami penurunan adalah berusaha dibantu buruh tidak tetap (1,43 persen poin), pekerja keluarga/tidak dibayar (0,73 persen poin), dan berusaha dibantu buruh tetap/dibayar (0,16 persen poin). Apabila dibandingkan Februari 2021, penurunan terjadi pada status berusaha dibantu buruh tidak tetap/dibayar, buruh/karyawan/pegawai, berusaha dibantu buruh tetap/ dibayar, dan pekerja keluarga/tidak dibayar masing-masing sebesar 1,01 persen poin, 0,79 persen poin, 0,40 persen poin dan 0,24 persen poin.

Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka

yang berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar).

Pada Agustus 2021, penduduk yang bekerja di kegiatan formal sebanyak 909,32 ribu orang (35,23 persen), sedangkan yang bekerja di kegiatan informal sebanyak 1,67 juta orang (64,77 persen). Penduduk bekerja di kegiatan formal pada Agustus 2021 naik sebesar 1,50 persen poin jika dibandingkan Agustus 2020, tetapi apabila dibandingkan Februari 2021 pekerja formal turun sebesar 1,19 persen poin

Tabel 1.10
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja
Menurut Status Pekerjaan Utama di Provinsi Sumatera Barat
Kondisi Februari 2020 – Agustus 2021

No	Status Pekerjaan Utama	Februari 2020		Agustus 2020		Februari 2021		Agustus 2021	
		(Ribu Orang)	%	(Ribu Orang)	%	(Ribu Orang)	%	(Ribu Orang)	%
1	Berusaha Sendiri	453,19	16,49	537,97	20,84	535,91	20,74	543,68	21,06
2	Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap	567,90	20,67	465,9	18,05	455,47	17,63	429,02	16,62
3	Berusaha Dibantu Buruh Tetap	130,09	4,73	92,63	3,59	98,94	3,83	88,54	3,43
4	Buruh/Karyawan/Pegawai	932,27	33,93	777,87	30,13	842,02	32,58	820,78	31,80
5	Pekerja Bebas di Pertanian	125,45	4,57	169,22	6,55	147,67	5,71	174,58	6,76
6	Pekerja Bebas di Non Pertanian	92,69	3,37	123,55	4,79	102,00	3,95	129,45	5,01
7	Pekerja Keluarga/Tak Dibayar	446,24	446,24	414,38	16,05	402,11	15,56	395,40	15,32
TOTAL		2 747,82	100,00	2 581,52	100,00	2 584,12	100,00	2 581,44	100,00

Sumber : Berita Resmi Statistik No.59/11/13/Th. XXIV, 05 November 2021

Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada Agustus 2021, penduduk bekerja masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD ke bawah yaitu sebanyak 32,27 persen. Sementara tenaga kerja yang berpendidikan tinggi yaitu Diploma dan Universitas sebesar 16,49 persen. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama baik pada Agustus 2020 maupun Februari 2021.

Dibandingkan dengan Agustus 2020, tenaga kerja dengan pendidikan SMP, SD ke bawah, dan SMA mengalami penurunan masing-masing sebesar 1,12 persen poin, 0,97 persen poin, dan 0,06 persen poin. Apabila dibandingkan dengan Februari 2021, tenaga kerja berpendidikan universitas, Diploma I/II/III dan SMK turun masing-masing sebesar 0,86 persen poin, 0,42 persen poin, dan 0,08 persen poin. Sementara penduduk bekerja dengan pendidikan SD ke bawah, SMA, dan SMP mengalami peningkatan masing-masing sebesar 0,88 persen poin, 0,24 persen poin dan 0,23 persen poin

Tabel 1.11
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut
Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Sumatera Barat Kondisi
Februari 2020 – Agustus 2021 (Persen)

NO	PENDIDIKAN TERTINGGI	Bulan			
		Februari 2020	Agustus 2020	Februari 2021	Agustus 2021
1	SD ke Bawah	32,90	33,25	31,39	32,27
2	Sekolah Menengah Pertama	17,97	18,67	17,32	17,55
3	Sekolah Menengah Atas	21,10	21,60	21,30	21,55
4	Sekolah Menengah Kejuruan	10,78	10,77	12,22	12,14
5	Diploma I/II/III	4,68	3,74	4,27	3,85
6	Universitas	12,57	11,96	13,50	12,64
JUMLAH		100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Berita Resmi Statistik No.59/11/13/Th. XXIV, 05 November 2021

5. Kondisi Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan menggunakan metode baru yang dirilis Tahun 2015, dimana IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk), dimana IPM menjelaskan bagaimana penduduk antara lain dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*) serta standar hidup layak (*decent standard of living*).

Umur harapan hidup saat lahir (UHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat, yang dihitung dari sensus dan survey kependudukan.

Rata-rata lama sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal, rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

Angka harapan lama sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas, untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Sedangkan pengeluaran perkapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran perkapita dan paritas daya beli.

Hasil perhitungan IPM di Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan penghitungan metode baru pada Tahun 2021 adalah 72,65 dengan rincian komponen Umur Harapan Hidup saat lahir adalah 69,59 tahun, Harapan Lama Sekolah 14,09 tahun, Rata-Rata Lama Sekolah

9,07 tahun dan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Rp.10.790,-(Ribu/Orang/Tahun), seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.12
Komponen Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2017-2021

NO	KOMPONEN IPM	SATUAN	AGUSTUS				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	68,78	69,01	69,31	69,47	69,59
2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,94	13,95	14,01	14,02	14,09
3	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,72	8,76	8,92	8,99	9,07
4	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan	Ribu Rupiah/Orang/Th)	10.306	10.638	10.925	10.733	10.790
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI SUMATERA BARAT			71,24	71,73	72,39	72,38	72,65

Sumber data : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

Untuk 19 Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat pada Tahun 21, IPM tertinggi adalah berada di Kota Padang sebesar 82,90 dan yang terendah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 61,35, seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.13
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota
di Sumatera Barat Tahun 2016-2020

KABUPATEN/KOTA	Indeks Pembangunan Manusia					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kab. Kepulauan Mentawai	58,27	59,25	60,28	61,26	61,09	61,35
Kab. Pesisir Selatan	68,39	68,74	69,40	70,08	69,90	70,03
Kab. Solok	67,67	67,86	68,60	69,08	69,08	69,24
Kab. Sijunjung	66,01	66,60	66,97	67,66	67,74	67,86
Kab. Tanah Datar	70,11	70,37	71,25	72,14	72,33	72,46
Kab. Padang Pariaman	68,44	68,90	69,71	70,59	70,61	70,76
Kab. Agam	70,36	71,10	71,70	72,37	72,46	72,57
Kab. Limapuluh Kota	68,37	68,69	69,17	69,67	69,47	69,68
Kab. Pasaman	64,57	64,94	65,60	66,46	66,64	66,77
Kab. Solok Selatan	67,47	67,81	68,45	68,94	69,04	69,23
Kab. Dharmas Raya	70,25	70,40	70,86	71,52	71,51	71,76
Kab. Pasaman Barat	66,03	66,83	67,43	68,21	68,49	68,76
Kota Padang	81,06	81,58	82,25	82,68	82,82	82,90
Kota Solok	77,07	77,44	77,89	78,38	78,29	78,41
Kota Sawah Lunto	70,67	71,13	71,72	72,39	72,64	72,88
Kota Padang Panjang	76,50	77,01	77,30	78,00	77,93	77,97

Kota Bukit Tinggi	79,11	79,80	80,11	80,71	80,58	80,70
Kota Payakumbuh	77,56	77,91	78,23	78,95	78,90	79,08
Kota Pariaman	75,44	75,71	76,26	76,70	76,90	77,07
Sumatera Barat	70,73	71,24	71,73	72,39	72,38	72,65

Sumber data : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat Tahun 2021

Sedangkan bila dibandingkan dengan IPM rata-rata Nasional Tahun 2021 maka IPM Provinsi Sumatera Barat sebesar 72,69 sudah lebih tinggi dibandingkan dengan IPM rata-rata Nasional yaitu sebesar 72,29, sebagaimana terlihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 1.14
IPM Menurut Provinsi se Indonesia dan IPM Rata-Rata Nasional

Provinsi	Indeks Pembangunan Manusia					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aceh	70,00	70,60	71,19	71,90	71,99	72,18
Sumatera Utara	70,00	70,57	71,18	71,74	71,77	72,00
Sumatera Barat	70,73	71,24	71,73	72,39	72,38	72,65
Riau	71,20	71,79	72,44	73,00	72,71	72,94
Jambi	69,62	69,99	70,65	71,26	71,29	71,63
Sumatera Selatan	68,24	68,86	69,39	70,02	70,01	70,24
Bengkulu	69,33	69,95	70,64	71,21	71,40	71,64
Lampung	67,65	68,25	69,02	69,57	69,69	69,90
Kep. Bangka Belitung	69,55	69,99	70,67	71,30	71,47	71,69
Kep. Riau	73,99	74,45	74,84	75,48	75,59	75,79
Dki Jakarta	79,60	80,06	80,47	80,76	80,77	81,11
Jawa Barat	70,05	70,69	71,30	72,03	72,09	72,45
Jawa Tengah	69,98	70,52	71,12	71,73	71,87	72,16
Di Yogyakarta	78,38	78,89	79,53	79,99	79,97	80,22
Jawa Timur	69,74	70,27	70,77	71,50	71,71	72,14
Banten	70,96	71,42	71,95	72,44	72,45	72,72
Bali	73,65	74,30	74,77	75,38	75,50	75,69
Nusa Tenggara Barat	65,81	66,58	67,30	68,14	68,25	68,65
Nusa Tenggara Timur	63,13	63,73	64,39	65,23	65,19	65,28
Kalimantan Barat	65,88	66,26	66,98	67,65	67,66	67,90
Kalimantan Tengah	69,13	69,79	70,42	70,91	71,05	71,25
Kalimantan Selatan	69,05	69,65	70,17	70,72	70,91	71,28
Kalimantan Timur	74,59	75,12	75,83	76,61	76,24	76,88
Kalimantan Utara	69,20	69,84	70,56	71,15	70,63	71,19
Sulawesi Utara	71,05	71,66	72,20	72,99	72,93	73,30

Provinsi	Indeks Pembangunan Manusia					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sulawesi Tengah	67,47	68,11	68,88	69,50	69,55	69,79
Sulawesi Selatan	69,76	70,34	70,90	71,66	71,93	72,24
Sulawesi Tenggara	69,31	69,86	70,61	71,20	71,45	71,66
Gorontalo	66,29	67,01	67,71	68,49	68,68	69,00
Sulawesi Barat	63,60	64,30	65,10	65,73	66,11	66,36
Maluku	67,60	68,19	68,87	69,45	69,49	69,71
Maluku Utara	66,63	67,20	67,76	68,70	68,49	68,76
Papua Barat	62,21	62,99	63,74	64,70	65,09	65,26
Papua	58,05	59,09	60,06	60,84	60,44	60,62
Indonesia	70,18	70,81	71,39	71,92	71,94	72,29

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

Salah satu komponen IPM adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS) untuk melihat jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalankan pendidikan formal. Di Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2021, RLS yang tertinggi berada di Kota Padang Panjang sebesar 11,63 tahun, diikuti oleh Kota Padang 11,59 tahun, Kota Bukittinggi 11,34 tahun, dan Kota Solok 11,04 tahun, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan rata-rata lama sekolahnya adalah 7,20 tahun. Kondisi rata-rata lama sekolah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.15.
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota
se-Sumatera Barat Tahun 2016-2021

KABUPATEN/KOTA	TAHUN					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kab. Kepulauan Mentawai	6,52	6,69	6,95	7,08	7,09	7,20
Kab. Pesisir Selatan	8,12	8,13	8,14	8,25	8,26	8,27
Kab. Solok	7,58	7,60	7,84	7,85	7,86	7,87
Kab. Sijunjung	7,50	7,72	7,77	8,10	8,11	8,12
Kab. Tanah Datar	8,12	8,14	8,44	8,45	8,61	8,62
Kab. Padang Pariaman	7,00	7,21	7,50	7,86	7,87	7,88
Kab. Agam	8,18	8,39	8,69	8,85	8,96	8,57
Kab. Limapuluh Kota	7,92	7,96	7,97	7,98	7,99	8,07
Kab. Pasaman	7,64	7,65	7,66	7,86	8,09	8,10
Kab. Solok Selatan	7,99	8,00	8,15	8,16	8,28	8,32
Kab. Dharmas Raya	8,23	8,24	8,25	8,46	8,47	8,55
Kab. Pasaman Barat	7,84	7,85	7,86	8,06	8,19	8,27
Kota Padang	11,24	11,32	11,33	11,34	11,58	11,59
Kota Solok	10,79	10,95	11,01	11,02	11,03	11,04
Kota Sawah Lunto	9,92	9,93	9,94	9,97	10,17	10,32
Kota Padang Panjang	11,42	11,43	11,44	11,45	11,62	11,63

Kota Bukit Tinggi	10,98	11,30	11,31	11,32	11,33	11,34
Kota Payakumbuh	10,30	10,45	10,46	10,72	10,73	10,81
Kota Pariaman	10,09	10,10	10,36	10,37	10,59	10,67
SUMATERA BARAT	8,59	8,72	8,76	8,92	8,99	9,07

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

Komponen pembentukan IPM yang lain adalah Umur Harapan Hidup (UHH), yang memperlihatkan derajat kesehatan suatu masyarakat, yang dihitung dari sensus dan survey kependudukan. Di Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2021, UHH yang tertinggi berada di Kota Kota Bukittinggi sebesar 74,50 tahun, diikuti oleh Kota Payakumbuh 73,84 tahun dan Kota Padang 73,69 tahun, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Umur Harapan Hidup 64,73 tahun. Kondisi rata-rata lama sekolah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.16
Perkembangan Umur Harapan Hidup Kabupaten/Kota
Se Sumatera Barat Tahun 2016-2021

KABUPATEN/KOTA	TAHUN					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kab. Kepulauan Mentawai	64,36	64,37	64,49	64,68	64,73	64,73
Kab. Pesisir Selatan	70,11	70,23	70,45	70,73	70,86	70,96
Kab. Solok	67,50	67,65	67,95	68,34	68,58	68,79
Kab. Sijunjung	65,33	65,44	65,69	66,02	66,21	66,36
Kab. Tanah Datar	68,93	69,11	69,38	69,73	69,94	70,12
Kab. Padang Pariaman	67,80	67,96	68,23	68,58	68,79	68,97
Kab. Agam	71,44	71,57	71,83	72,17	72,37	72,53
Kab. Limapuluh Kota	69,27	69,31	69,47	69,70	69,79	69,84
Kab. Pasaman	66,40	66,54	66,82	67,18	67,40	67,59
Kab. Solok Selatan	66,78	66,92	67,21	67,58	67,81	68,01
Kab. Dharmas Raya	70,30	70,44	70,73	71,10	71,33	71,53
Kab. Pasaman Barat	67,09	67,15	67,37	67,67	67,82	67,94
Kota Padang	73,19	73,20	73,35	73,57	73,65	73,69
Kota Solok	72,83	72,92	73,14	73,45	73,61	73,73
Kota Sawahlunto	69,33	69,39	69,59	69,87	70,00	70,10
Kota Padang Panjang	72,45	72,46	72,58	72,77	72,82	72,82
Kota Bukit Tinggi	73,60	73,69	73,91	74,22	74,38	74,50
Kota Payakumbuh	73,03	73,13	73,33	73,61	73,74	73,84
Kota Pariaman	69,63	69,67	69,87	70,15	70,28	70,38
SUMATERA BARAT	68,73	68,78	69,01	69,31	69,47	69,59

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

Sedangkan pengeluaran perkapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran perkapita dan paritas daya beli di Sumatera Barat terlihat pada tahun 2021 adalah Rp.10.790.000,-/Orang/Tahun. Pengeluaran perkapita yang tertinggi di Sumatera Barat adalah Kota Padang sebesar Rp.14.540.000,-/Orang/Tahun, diikuti oleh Kota Bukittinggi

sebesar Rp.13.331.000,-/Orang/Tahun dan Kota Payakumbuh sebesar Rp.13.317.000,-/Orang/Tahun. Sedangkan yang terendah pengeluaran perkapitanya adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp. 6.321.000,-/Orang/Tahun. Perkembangan pengeluaran perkapita di Sumatera Barat dapat terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.17
Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota
Se Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)

KABUPATEN/KOTA	TAHUN					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kab. Kepulauan Mentawai	5.771	6.010	6.211	6.429	6.281	6.321
Kab. Pesisir Selatan	8.605	8.819	9.089	9.444	9.212	9.270
Kab. Solok	9.664	9.743	10.035	10.309	10.171	10.215
Kab. Sijunjung	9.895	10.093	10.277	10.395	10.361	10.389
Kab. Tanah Datar	10.296	10.331	10.417	10.709	10.588	10.616
Kab. Padang Pariaman	10.455	10.579	10.919	11.158	10.998	11.050
Kab. Agam	9.111	9.388	9.489	9.780	9.651	9.662
Kab. Limapuluh Kota	8.936	9.151	9.500	9.842	9.596	9.668
Kab. Pasaman	7.678	7.882	8.238	8.599	8.425	8.440
Kab. Solok Selatan	9.802	9.891	10.199	10.505	10.325	10.367
Kab. Dharmas Raya	10.781	10.951	11.189	11.431	11.273	11.324
Kab. Pasaman Barat	8.393	8.704	8.979	9.180	9.047	9.089
Kota Padang	13.721	13.957	14.312	14.728	14.481	14.540
Kota Solok	11.519	11.673	11.968	12.337	12.117	12.168
Kota Sawah Lunto	9.051	93.43	9.765	10.238	10.182	10.195
Kota Padang Panjang	9.804	10.240	10.440	11.013	10.734	10.754
Kota Bukit Tinggi	12.475	12.816	13.035	13.586	13.282	13.331
Kota Payakumbuh	12.705	12.858	13.114	13.464	13.281	13.317
Kota Pariaman	12.141	13.425	12.611	12.958	12.796	12.818
SUMATERA BARAT	10.126	10.306	10.638	10.925	10.733	10.790

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Tahun 2021

6. Kondisi Perekonomian

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktifitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pengeluaran dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah diukur berdasarkan pertambahan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) antara 2 (dua) tahun.

Dalam kurun waktu 6 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat cenderung mengalami perlambatan dimana ekonomi yang sempat tumbuh 5,27% pada tahun 2016 justru terus menurun hingga hanya mencapai angka 5,05% pada tahun 2019. Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 bahkan lebih memperparah kondisi perekonomian

daerah yang berkontraksi sekitar -1,6%. Walaupun kondisi ini terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia dan bahkan dunia, kontraksi pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun 2020 masih lebih baik dari nasional pada angka -2,07%

Seiring dengan diterapkannya beberapa kebijakan dalam rangka pemulihan ekonomi di Indonesia khususnya pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat, maka pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan. Berdasarkan data BPS, tercatat pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat mencapai 3,29% tahun 2021 dibawah pertumbuhan ekonomi Nasional yang mencapai 3,69%.

Pertumbuhan terjadi pada hampir semua lapangan usaha kecuali Pertambangan dan Penggalian mengalami kontraksi sebesar 1,77 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Jasa Keuangan sebesar 8,46 persen, diikuti oleh Jasa Lainnya sebesar 7,10 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 6,42 persen; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 5,88 persen; dan Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 5,53 persen, seperti pada tabel 1.18 berikut :

Tabel 1.18
Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB ADHK) Tahun 2016-2021 (%)
Provinsi Sumatera Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010

NO	LAPANGAN USAHA	PERTUMBUHAN EKONOMI					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	2,01	3,43	3,52	2,48	1,16	2,19
2.	Pertambangan dan Penggalian	2,00	1,13	5,79	6,22	-1,31	-1,77
3.	Industri Pengolahan	4,90	2,27	-0,58	-1,98	-0,54	3,68
4.	Pengadaan Listrik & Gas	10,94	4,06	4,09	4,20	-6,81	3,15
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	6,40	3,96	2,24	6,10	-1,04	5,53
6.	Konstruksi	6,59	7,23	7,00	8,47	-2,92	2,18
7.	Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,41	6,50	6,99	7,29	-1,14	5,12
8.	Transportasi dan Pergudangan	7,67	7,17	6,43	4,75	-16,10	2,56
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,62	8,76	8,23	8,11	-15,95	5,63
10.	Informasi dan Komunikasi	9,40	8,74	8,52	8,73	9,55	6,42
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,03	2,11	0,99	2,29	1,34	8,46
12.	Real Estate	5,37	4,49	4,67	6,78	0,22	2,41
13.	Jasa Perusahaan	4,94	5,19	5,45	6,20	-3,98	1,13
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,96	4,49	5,97	6,96	-0,59	0,85
15.	Jasa Pendidikan	7,85	9,94	7,19	7,94	5,03	1,84

NO	LAPANGAN USAHA	PERTUMBUHAN EKONOMI					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,47	8,58	7,28	7,54	8,83	5,88
17.	Jasa Lainnya	9,35	7,95	7,86	7,50	-10,10	7,10
	PDRB SUMATERA BARAT	5,27	5,30	5,14	5,01	-1,62	3,29

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat Tahun 2016-2021

Struktur PDRB Sumatera Barat menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2021 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Sumatera Barat masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebesar 21,71 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 15,77 persen; Konstruksi sebesar 10,45 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,20 persen; dan Industri Pengolahan 8,81 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Sumatera Barat mencapai 66,77 persen, terlihat pada tabel 1.19 dibawah ini”

Tabel 1.19
Struktur Ekonomi Menurut Lapangan Usaha
Di Sumatera Barat, Tahun 2016-2021

NO	KATEGORI	2016	2017	2018	2019	2020	2021	RATA-RATA PDRB (%)
1.	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	24,06	23,61	23,18	22,15	22,36	21,71	22,84
2.	Pertambangan dan Penggalan	4,53	4,27	4,26	4,30	4,27	4,20	4,30
3.	Industri Pengolahan	10,09	9,74	9,09	8,38	8,64	8,81	9,12
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,11
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
6.	Konstruksi	9,29	9,35	9,64	10,09	10,18	10,20	9,79
7.	Pedagang Besar & Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,76	14,91	15,31	15,79	15,77	15,77	15,38
8.	Transportasi dan Pergudangan	12,46	12,65	12,66	12,60	10,44	10,30	11,85
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,29	1,33	1,36	1,43	1,24	1,27	1,30
10.	Informasi dan Komunikasi	4,99	5,28	5,47	5,81	6,43	6,62	5,77
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,17	3,10	3,01	2,91	3,04	3,28	3,08

12.	Real Estate	2,01	1,97	1,96	2,01	2,06	2,05	2,01
13.	Jasa Perusahaan	0,43	0,43	0,43	0,44	0,44	0,43	0,43
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	5,82	5,83	5,92	6,13	6,72	6,90	6,22
15.	Jasa Pendidikan	3,84	4,13	4,20	4,35	4,71	4,64	4,31
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,28	1,34	1,39	1,42	1,62	1,69	1,46
17.	Jasa Lainnya	1,77	1,84	1,93	2,00	1,88	1,95	1,89
	Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber Data : BPS Provinsi Sumatera Barat tahun 2021

Struktur PDRB Sumatera Barat menurut pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2021 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Aktivitas permintaan akhir masih didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang mencakup lebih dari separuh PDRB Sumatera Barat (53,88 persen). Komponen lainnya yang memiliki peranan besar terhadap PDRB secara berturut-turut adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (30,30 persen); Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (11,53 persen); Ekspor Luar Negeri (16,25 persen); dan Dikurangi Impor Barang dan Jasa (2,17 persen), sedangkan Pengeluaran Konsumsi LNPRRT relatif kecil yaitu 1,11 persen.

Tabel 1.20
Laju Pertumbuhan dan Distribusi Menurut Pengeluaran
Tahun 2018-2021 (persen)

Komponen Pengeluaran		Laju Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan 2010				Distribusi Atas Dasar Harga Berlaku			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,62	4,74	-2,47	1,97	53,23	54,41	54,09	53,88
2.	Pengeluaran Konsumsi LNPRRT	6,54	11,85	-4,39	1,79	1,06	1,14	1,12	1,11
3.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,40	5,13	-8,50	0,15	12,59	12,58	11,84	11,53
4.	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	3,52	5,16	-2,62	1,80	29,82	30,11	30,00	30,30
5.	Perubahan Inventori	68,68	-60,75	261,03		0,11	0,04	0,15	0,15
6.	Ekspor Luar Negeri	- 6,83	-7,52	-3,31	53,53	11,07	9,01	8,95	16,25
7.	Impor Luar Negeri	0,31	-14,31	-53,85	59,55	4,05	2,92	1,40	2,17
8.	Net Ekspor Antar Daerah	-76,69	-128,41	-96,65		-3,83	-4,36	-4,73	11,04
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	5,14	5,01	-1,62	3,29	-1,62	100,00	100,00	100,00

Sumber data : Sumber Data : BPS Provinsi Sumatera Barat tahun 2021

Ekspor asal Sumatera Barat pada November 2021 terjadi pada beberapa negara tujuan. Nilai ekspor terbesar pada November 2021 adalah ke Pakistan sebesar US\$61,92 juta, selanjutnya ke Bangladesh sebesar US\$44,57 juta dan ke India sebesar US\$30,68 juta.

Ekspor asal Sumatera Barat ke negara Pakistan memiliki peran yang terbesar terhadap total ekspor Sumatera Barat pada Januari–November 2021, yaitu sebesar 25,68 persen. Selanjutnya ekspor ke India memberikan peran sebesar 15,64 persen.

Komoditas utama yang di ekspor ke Pakistan pada November 2021 adalah Refined palm oil dan Liquid fractions of refined palm oil, with iodine value 55 or more but less than 60. Sementara itu ekspor ke Bangladesh komoditas utama yang diekspor pada November 2021 adalah Liquid fractions of refined palm oil, with iodine value 55 or more but less than 60 dan Solid fractions of refined palm oil, with iodine value 30 or more, but less than 40.

Tabel 1.21
Ekspor Sumatera Barat menurut Negara Tujuan
November 2020 – November 2021

No	Negara Tujuan	Nilai FOB (Juta US\$)					Perubahan (%)			Peran thd Total Jan-Nov 2021 (%)
		Nov 2020	Okt 2021	Nov 2020	Jan-Nov 2020	Jan-Nov 2021	Nov 2021 thd Okt 2021	Nov 2021 thd Nov 2020	Jan-Nov 2021 thd 2020	
1	PAKISTAN	56,07	80,36	61,92	93,10	709,41	-22,95	10,44	661,99	25,68
2	BANGLADESH	24,54	39,45	44,57	134,43	277,08	12,97	81,61	106,11	10,03
3	INDIA	15,77	18,36	30,68	344,71	431,96	67,09	94,56	25,31	15,64
4	MYANMAR		10,84	21,02	71,18	181,12	93,78		154,45	6,56
5	SPAIN	9,19	0,08	17,05	61,44	84,60	21.424,41	85,45	37,70	3,06
6	UNITED STATES	24,97	9,68	10,86	196,20	172,78	12,17	-56,53	-11,94	6,25
7	BRAZIL	0,18	0,14	10,30	9,54	21,51	7.362,28	5.750,90	125,56	0,78
8	JAPAN	1,84	7,47	9,16	43,63	84,28	22,62	396,80	93,19	3,05
9	NETHERLANDS	0,20	8,66	4,14	6,35	57,46	-52,21	2.006,69	804,81	2,08
10	KOREA, REPUBLIC OF	3,05	0,00	1,76	27,46	7,69	490.128,43	-42,32	-72,00	0,28
Total 10 Negara		135,81	175,04	211,45	988,04	2.027,90	20,80	55,70	105,25	73,41
Lainnya		39,12	109,52	6,50	412,88	734,62	-94,06	-83,38	77,92	26,59
Total Ekspor		174,92	284,56	217,95	1.400,92	2.762,52	-23,41	24,60	97,19	100,00

Sumber data : Berita Resmi Statistik, No. 04/01/13/Th. XXV, 3 Januari 2022

Peranan dan perkembangan ekspor asal Sumatera Barat menurut sektor pada November 2021 dapat dilihat pada Tabel 1.21. Ekspor produk industri pengolahan mengalami penurunan sebesar 25,36 persen dibandingkan sebelumnya. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total ekspor Sumatera Barat periode Januari–November 2021 sebesar 95,34 persen.

Tabel 1.22
Ekspor Nonmigas Sumatera Barat menurut Sektor
November 2020 – November 2021

No	SEKTOR	Nilai FOB (Juta US\$)					Perubahan (%)			Peran thd Total Jan- Nov 2021 (%)
		Nov 2020	Okt 2021	Nov 2020	Jan- Nov 2020	Jan- Nov 2021	Nov 2021 thd Okt 2021	Nov 2021 thd Nov 2020	Jan- Nov 2021 thd 2020	
1	INDUSTRI PENGOLAHAN	165,95	274,46	204,86	1.312,85	2.633,65	-25,36	23,45	100,61	95,34
2	PERTAMBANG AN	0,01	-	2,14	0,02	2,21	-	38.410,75	9.102,60	0,08
3	PERTANIAN	8,96	10,11	10,95	88,05	126,66	8,31	22,13	43,86	4,59
TOTAL EKSPOR		174,92	284,56	217,95	1.400,92	2.762,52	-23,41	24,60	97,19	100,00

Sumber data : Berita Resmi Statistik, No. 10/02/13/Th. XXIII, 3 Februari 2020

Ekspor senilai US\$217,95 juta pada November 2021 sebagian besar dimuat di pelabuhan muat yang ada di Sumatera Barat. Ekspor asal Sumatera Barat melalui pelabuhan muat di Sumatera Barat ini mengalami penurunan sebesar 24,68 persen dibanding sebelumnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.23
Nilai Ekspor Sumatera Barat menurut Pelabuhan Muat
November 2020 – November 2021

No	SEKTOR	Nilai FOB (Juta US\$)					Perubahan (%)			Peran thd Total Jan- Nov 2021 (%)
		Nov 2020	Okt 2021	Nov 2020	Jan- Nov 2020	Jan- Nov 2021	Nov 2021 thd Okt 2021	Nov 2021 thd Nov 2020	Jan- Nov 2021 thd 2020	
	Sumatera Barat	159,92	279,09	210,21	1.211,73	2.616,73	-24,68	31,45	115,95	94,72
1	Teluk Bayur	159,92	279,08	210,18	1.211,23	2.615,40	-24,69	31,43	115,93	94,67
2	Bandara Internasional Minangkabau	-	0,01	0,03	0,50	1,33	157,98	-	166,96	0,05
	Luar Sumatera Barat	15,01	5,47	7,74	189,19	145,79	41,46	-48,41	-22,94	5,28
	Sumatera	6,02	3,42	6,28	58,73	68,50	83,49	4,28	16,63	2,48
3	Belawan	5,96	2,47	3,79	53,53	52,55	53,38	-36,44	-1,83	1,90
4	Pelabuhan Lainnya	0,06	0,95	2,49	5,20	15,95	161,54	3.872,68	206,52	0,58
	LUAR SUMATERA	8,98	2,05	1,46	130,46	77,29	-28,76	-83,74	-40,75	2,80
5	TANJUNG PRIOK	8,87	1,55	1,02	126,60	72,63	-34,05	-88,45	-42,63	2,63
6	PELABUHAN LAINNYA	0,11	0,50	0,44	3,86	4,67	-12,16	294,08	20,96	0,17
TOTAL EKSPOR		174,92	174,92	217,95	1.400,92	2.762,52	-23,41	24,60	97,19	100,00

Sumber data : Berita Resmi Statistik, No. 04/01/13/Th. XXV, 3 Januari 2022

Ekspor asal Sumatera Barat pada November 2021 terjadi pada beberapa golongan barang, nilai terbesar adalah golongan lemak dan minyak hewan/nabati sebesar US\$181,49 juta diikuti golongan karet dan barang dari karet sebesar US\$14,28 juta. Bila dilihat peranan golongan barang terhadap total ekspor Januari–November 2021 tercatat 79,89 persen merupakan ekspor dari golongan lemak & minyak hewan/nabati, dan golongan karet & barang dari karet emberikan peran sebesar 6,10 persen.

Tabel 1.24
Ekspor Nonmigas Beberapa Golongan Barang HS 2 Digit
Asal Provinsi Sumatera Barat November 2020 – November 2021

No	SEKTOR	Nilai FOB (Juta US\$)					Perubahan (%)			Peran thd Total Jan- Nov 2021 (%)
		Nov 2020	Okt 2021	Nov 2020	Jan- Nov 2020	Jan- Nov 2021	Nov 2021 thd Okt 2021	Nov 2021 thd Nov 2020	Jan- Nov 2021 thd 2020	
1	Lemak & minyak hewan/nabati	137,74	233,73	181,49	1.009,25	2.206,86	-22,35	31,77	118,66	79,89
2	Karet dan Barang dari Karet	11,18	11,42	14,28	136,46	168,50	25,04	27,71	23,48	6,10
3	Bahan-bahan nabati	3,99	6,66	6,99	40,60	58,09	5,00	75,36	43,07	2,10
4	Kopi, Teh, Rempah-rempah	5,29	2,06	3,37	58,10	50,55	63,80	-36,30	-12,99	1,83
5	Sari Bahan Samak & Celup	2,42	2,89	3,07	23,63	38,30	6,14	26,54	62,09	1,39
6	Ampas / Sisa Industri Makanan	1,87	3,27	2,76	19,62	28,73	-15,51	48,02	46,45	1,04
7	Bahan Bakar Mineral			2,14		2,14				0,08
8	Buah-buahan	1,44	2,02	1,91	23,27	34,98	-5,79	32,37	50,34	1,27
9	Minyak atsiri, Kosmetik wangi-wangian	1,43	1,16	1,55	12,84	17,82	33,36	8,23	38,82	0,65
10	Berbagai Makanan Olahan	0,14	0,29	0,21	2,77	1,69	-26,87	46,91	-38,95	0,06
Total 10 Golongan Barang		165,49	263,48	217,75	1.326,54	2.607,68	-17,36	31,58	96,58	94,39
Lainnya		9,43	21,08	0,20	74,38	154,84	-99,05	-97,89	108,19	5,61
TOTAL EKSPOR		174,92	284,56	217,95	1.400,92	2.762,52	-23,41	24,60	97,19	100,00

Sumber data : Berita Resmi Statistik, No.. 04/01/13/Th. XXV, 3 Januari 2022

Dari beberapa golongan barang, impor pada November 2021 yang terbesar adalah golongan bahan bakar mineral sebesar US\$36,16 juta. Sementara itu, golongan garam, belerang, kapur sebesar US\$1,84 juta. Golongan bahan bakar mineral yang paling besar

diimpor adalah golongan Motor spirit of RON 90 & above but below RON 97 unblended. Selanjutnya golongan garam, belerang, kapur yang paling besar diimpor adalah golongan Gypsum, anhydrite. Secara kumulatif, impor bahan bakar mineral mendominasi impor Sumatera Barat pada Januari - November 2021, yaitu 72,65 persen.

Tabel 1.25
Impor Sumatera Barat Beberapa Golongan Barang HS 2 Dijit
November 2020 – November 2021

No	Golongan Barang	Nilai FOB (Juta US\$)					Perubahan (%)			Peran thd Total Jan-Nov 2021 (%)
		Nov 2020	Okt 2021	Nov 2020	Jan-Nov 2020	Jan-Nov 2021	Nov 2021 thd Okt 2021	Nov 2021 thd Nov 2020	Jan-Nov 2021 thd 2020	
1	Bahan bakar mineral	2,41	25,34	36,16	85,41	277,86	42,71	1.399,19	225,31	72,65
2	Garam, Belerang, Kapur	0,08	0,29	1,84	6,41	6,34	537,75	2.101,41	-1,22	1,66
3	Mesin-mesin / Pesawat Mekanik	0,14	3,39	1,48	10,77	10,67	-56,45	925,58	-0,90	2,79
4	Kertas / Karton	0,00	0,24	1,05	4,42	3,56	345,57	4.057.030,77	-19,44	0,93
5	Benda-benda dari Besi dan Baja	0,04	0,00	0,38	1,53	1,15	9.402,10	828,41	-25,18	0,30
Total 5 Golongan Barang		2,68	29,25	40,91	108,55	299,58	39,82	1.426,36	175,97	78,33
Lainnya		5,92	4,46	0,51	67,06	82,87	-88,48	-91,33	23,57	21,67
TOTAL IMPOR		8,60	33,71	41,42	175,62	382,45	22,87	381,51	117,78	100,00

Sumber data : Berita Resmi Statistik, No. 04/01/13/Th. XXV, 3 Januari 2022

Dari total impor pada November 2021 terlihat impor terbesar berasal dari Malaysia senilai US\$27,25 juta, selanjutnya dari Singapore US\$10,48 juta. Impor dari Malaysia didominasi oleh golongan bahan bakar mineral, yaitu Motor spirit of RON 90 & above but below RON 97 unblended dan Of other RON unblended. Sementara itu impor dari Singapore juga didominasi oleh golongan Motor spirit of RON 90 & above but below RON 97 unblended. Secara kumulatif, impor dari Singapore mendominasi impor Sumatera Barat pada Januari–November 2021, yaitu 50,05 persen dari total impor, disusul impor dari Malaysia (25,68 persen)

Tabel 1.26
Impor Sumatera Barat Menurut Negara Asal
November 2020 – November 2021

No	Negara	Nilai FOB (Juta US\$)					Perubahan (%)			Peran thd Total Jan- Nov 2021 (%)
		Nov 2020	Okt 2021	Nov 2020	Jan- Nov 2020	Jan- Nov 2021	Nov 2021 thd Okt 2021	Nov 2021 thd Nov 2020	Jan- Nov 2021 thd 2020	
1	MALAYSIA	0,05	11,55	27,25	24,99	98,21	135,88	58.109,07	293,01	25,68
2	SINGAPORE	2,50	17,28	10,48	71,05	191,42	-39,31	320,02	169,42	50,05
3	OMAN	-	-	1,74	4,78	4,17	-	-	-12,69	1,09
4	SWEDEN	0,00	0,24	1,29	3,48	2,26	445,57	683.291,53	-35,09	0,59
5	CHINA	0,64	0,37	0,36	10,73	7,61	-3,38	-43,53	-29,12	1,99
Total 5 Negara Asal		3,18	29,44	41,12	115,03	303,67	39,70	1.193,34	163,99	79,40
Lainnya		5,42	4,28	0,30	60,59	78,78	-93,03	-94,50	30,03	20,60
TOTAL IMPOR		8,60	33,71	41,42	175,62	382,45	22,87	381,51	117,78	100,00

Sumber data : Berita Resmi Statistik, No. 04/01/13/Th. XXV, 3 Januari 2022

Dari Tabel berikut ini impor pada November 2021 senilai US\$41,42 juta hanya sebagian kecil di pelabuhan bongkar Teluk Bayur. Impor melalui pelabuhan bongkar Teluk Bayur ini mengalami penurunan sebesar 32,70 persen dibanding dengan sebelumnya.

Tabel 1.27
Impor Sumatera Barat Menurut Pelabuhan Bongkar
November 2020 – November 2021

No	SEKTOR	Nilai FOB (Juta US\$)					Perubahan (%)			Peran thd Total Jan- Nov 2021 (%)
		Nov 2020	Okt 2021	Nov 2020	Jan- Nov 2020	Jan- Nov 2021	Nov 2021 thd Okt 2021	Nov 2021 thd Nov 2020	Jan-Nov 2021 thd 2020	
	Sumatera Barat	8,46	5,04	3,39	174,56	270,70	-32,70	-59,90	55,08	70,78
1	Teluk Bayur	8,46	5,04	3,39	174,54	270,70	-32,70	-59,90	55,09	70,78
2	Bandara Internasional Minangkabau	-	-	-	0,01	-	-	-	-	-
	Luar Sumatera Barat	0,15	28,67	38,03	1,06	111,75	32,63	25.839,11	10.442,63	29,22
	Sumatera	0,13	28,67	38,02	0,91	111,71	32,62	29.219,27	12.128,67	29,21
1	Tanjung Beringin	-	25,49	36,41	-	105,85	42,84			27,68
2	Pelabuhan Lainnya	0,13	3,18	1,61	0,91	5,86	-49,31	1.143,75	541,62	1,53
	Luar Sumatera	0,02	0,00	0,01	0,15	0,04	126,54	-58,50	-72,61	0,01
1	Sukarno Hatta	0,02	0,00	0,01	0,15	0,04	126,54	-58,50	-72,61	0,01
TOTAL EKSPOR		8,60	33,71	41,42	175,62	382,45	22,87	381,51	117,78	100,00

Sumber data : Berita Resmi Statistik, No. 04/01/13/Th. XXV, 3 Januari 2022

Indikator lain dalam meningkatkan perekonomian di Sumatera Barat adalah pariwisata, dimana Sumatera Barat merupakan salah satu tujuan wisata yang menarik di Indonesia. Dari sektor pariwisata diharapkan dapat memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat sekitarnya, memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja serta kesempatan berusaha sekaligus memperkenalkan identitas dan kebudayaan bangsa.

Perkembangan industri pariwisata tidak lepas dari jumlah kunjungan wisatawan, Tingkat Penghunian Kamar Hotel (TPK) dan rata-rata lama menginap untuk tamu asing dan tamu dalam negeri. Dari tiga indikator tersebut dapat mencerminkan perkembangan pariwisata di Sumatera Barat.

Pada Desember 2021 belum ada wisatawan mancanegara (wisman) yang datang langsung melalui Bandara Internasional Minangkabau (BIM) ke Sumatera Barat. Sejak bulan April 2020 sampai dengan Desember 2021 tidak ada kunjungan wisman yang datang ke Sumatera Barat, sebagai dampak Pandemi Covid-19.

Tabel 1.28
Wisman yang Berkunjung ke Sumatera Barat menurut Kebangsaan
Tahun 2018 – Tahun 2020

Kebangsaan Wisatawan	Banyaknya Wisatawan Asing ke Provinsi Sumatera Barat Melalui Bandara Internasional Minangkabau Menurut Kebangsaan (orang)		
	2018	2019	2020
Malaysia	43 344	46 730	8 831
Australia	3 004	3 069	296
Singapura	1 729	598	88
Perancis	688	670	137
Amerika Serikat	562	707	86
Inggris	438	436	45
Tiongkok	359	416	255
Jerman	319	310	54
Jepang	295	290	60
India	251	176	19
Lain-lain	3 380	7 729	1 004
Jumlah	54 369	61 131	10 875

Sumber : Data Olahan BPS dari Laporan Kantor Imigrasi Kelas I Padang

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang bulan Desember 2021 berdasarkan laporan yang masuk dengan rata-rata 56,01 persen atau mengalami peningkatan sebesar 0,44 poin dibanding TPK November 2021 yang tercatat sebesar 55,57 persen.

Bila dilihat menurut klasifikasi hotel, terjadi peningkatan TPK pada sebagian besar kategori hotel bintang. Peningkatan terbesar adalah TPK hotel bintang 1 sebesar 10,36 poin, diikuti TPK hotel bintang 3 naik sebesar 3,40 poin, dan TPK hotel bintang 2 naik sebesar 0,97 poin. Sementara TPK hotel bintang 4 turun sebesar 6,57 poin.

Tabel 1.29
TPK Hotel Berbintang menurut Klasifikasi Bintang di Sumatera Barat
Oktober 2020 – Oktober 2021

NO	KLASIFIKASI BINTANG	TKP (%)			Perubahan Desember 2021 thd November 2021	Perubahan Desember 2021 thd November 2021
		Desember 2020	November 2021	Desember 2021		
1	Bintang 1	27.55	19.90	30.26	10.36	2.71
2	Bintang 2	46.71	51.76	52.73	0.97	6.02
3	Bintang 3	65.49	57.43	60.83	3.40	-4.66
4	Bintang 4	59.74	71.30	64.73	-6.57	4.99
Sumatera Barat		53.44	55.57	56.01	0.44	2.57

Sumber data : Berita Resmi Statistik No. 09/02/13/Th. XXV, 2 Februari 2022

Rata-rata lama menginap tamu (RLMT) Asing dan Indonesia pada hotel berbintang di Sumatera Barat bulan Desember 2021 adalah selama 1,25 hari, turun 0,08 hari bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tercatat 1,33 hari. RLMT asing bulan Desember 2021 tercatat 1,38 hari, turun sebesar 0,08 hari dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tercatat 1,46 hari. RLMT Indonesia bulan Desember 2021 tercatat 1,25 hari, turun 0,08 hari dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tercatat 1,33 hari. Bila dirinci menurut kelas hotel, terlihat RLMT asing pada hotel bintang 1 yang tercatat 2,00 hari paling tinggi dibandingkan kelas hotel lainnya. Diikuti RLMT pada hotel bintang 2 tercatat 1,85 hari, dan hotel bintang 4 tercatat 1,27 hari, dan hotel bintang 3 tercatat 1,00 hari. Sementara RLMT Indonesia pada hotel bintang 3 tercatat 1,32 hari paling tinggi dibanding kelas hotel lainnya. Diikuti RLTM pada hotel bintang 4 tercatat 1,27 hari, hotel bintang 2 tercatat 1,18 hari, dan hotel bintang 1 tercatat 1,04 hari.

Tabel 1.30
Rata-rata Lama Menginap Tamu Asing dan Indonesia pada Hotel Berbintang
di Sumatera Barat Desember 2020 - Desember 2021

No	Klasifikasi Bintang	Rata Rata Lama Menginap Tamu								
		ASING			INDONESIA			JUMLAH		
		Des 2020	Nov 2021	Des 2021	Des 2020	Nov 2021	Des 2021	Des 2020	Nov 2021	Des 2021
1	Bintang 1	-	0.00	2.00	1.09	1.08	1.04	1.09	1.08	1.04
2	Bintang 2	3.88	2.04	1.85	2.15	1.29	1.18	2.15	1.29	1.18
3	Bintang 3	4.75	1.67	1.00	1.38	1.33	1.32	1.38	1.33	1.32
4	Bintang 4	2.61	1.19	1.27	1.34	1.38	1.27	1.35	1.38	1.27
	Sumbar	3.17	1.46	1.38	1.52	1.33	1.25	1.52	1.33	1.25

Sumber data : Berita Resmi Statistik No. 09/02/13/Th. XXV, 2 Februari 2022

BAB II

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG DILAKSANAKAN BADAN PERENCANAAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

2.1 Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan

Untuk melaksanakan Fungsi Penunjang Perencanaan, Bappeda Provinsi Sumatera Barat mendapat alokasi APBD pada tahun 2021 sebesar Rp. 23.158.801.521,- dengan realisasi Rp. 22.543.092.512,- atau sebesar 97,34% dengan uraian sebagai berikut:

1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Sasaran strategis yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2021 berdasarkan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat dengan Gubernur Sumatera Barat meliputi 2 (dua) sasaran dengan capaian masing-masing indikator kinerja adalah 100% sebagaimana digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan	Persentase Kesesuaian Antar Dokumen Perencanaan	100%	100%	100%
		1. Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra			
		2. Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja			
		3. Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD			
		4. Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS			
2	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	100%

Dalam rangka pencapaian keberhasilan sasaran Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan sebagaimana tabel diatas, pada Tahun 2021 juga telah disediakan anggaran melalui APBD/P Provinsi Sumatera Barat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 9.466.759.882,-. Anggaran ini tersebar pada 2 (dua)

Program yaitu Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.549.446.189,- (3 kegiatan dengan 12 sub kegiatan) dan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 6.917.313.693,- (3 kegiatan dengan 24 sub kegiatan).

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 9.466.759.882,- terealisasi Rp. 9.051.256.118,- atau 95,61%. Artinya, terjadi efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 415.503.764,- (4,38%). Efisiensi tertinggi berasal dari pelaksanaan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang realisasi anggarannya sebesar 94,32%. Beberapa hal yang menimbulkan adanya efisiensi anggaran diantaranya adalah sebagai berikut:

- Efisiensi belanja makanan dan minuman rapat
- Efisiensi belanja perjalanan dinas
- Sisa pengadaan barang dan jasa

Anggaran, realisasi belanja dan efisiensi yang dicapai tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan secara lengkap disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2021
Pada Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Capaian
I.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.549.446.189	2.533.415.648	99,37
1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan Dan Pendanaan	1.365.724.408	1.360.815.026	99,64
2	Analisis Data Dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	394.348.220	392.049.372	99,42
3	Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	789.373.561	780.551.250	98,88
II.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	6.917.313.693	6.517.840.470	94,23
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	1.627.533.710	1.574.451.740	96,74
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian Dan SDA	985.864.535	977.464.605	99,15
3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan	4.303.915.448	3.965.924.125	92,15

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Capaian
III.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	13.692.041.639	13.491.836.394	98,54
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	387.984.160	386.223.769	99,55
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.659.209.225	8.566.864.944	98,93
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	144.150.176	143.007.646	99,21
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	83.720.032	83.312.550	99,51
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.194.214.397	2.118.225.750	96,54
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	104.771.400	100.979.000	96,38
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.606.274.999	1.590.113.744	98,99
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	511.717.250	503.108.891	98,32
TOTAL BELANJA		23.158.801.521	22.543.092.512	97,34%

2. Capaian kinerja keluaran masing-masing sub kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Sesuai Dokumen Anggaran
Realisasi Serapan Anggaran Per Sub Tahun 2021

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	100%		13.692.041.639	13.491.836.394	98,54
I	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100%	100%	100	387.984.160	386.223.769	99,55
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perangkat daerah yang disusun	3 dokumen	3 dokumen	100	317.595.130	317.080.969	99,84
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100	7.009.040	6.791.400	96,89

No	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100	7.931.540	7.719.400	97,33
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100	7.609.040	7.550.400	99,23
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100	7.956.090	7.848.800	98,65
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	100	22.846.830	22.497.800	98,47
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi kinerja triwulanan	4 dokumen	4 dokumen	100	17.036.490	16.735.000	98,23
II.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	100%	100	8.659.209.225	8.566.864.944	98,93
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	84 orang	84 orang	100	8.318.238.825	8.228.752.244	98,92

No	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	22 orang	22 orang	100	263.204.000	261.144.400	99,22
10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang diterbitkan	109 dokumen (24 Pengesahan SPJ, 85 SPP dan SPM)	109 dokumen (24 Pengesahan SPJ, 85 SPP dan SPM)	100	20.335.000	19.966.400	98,19
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	100	9.589.000	9.572.800	99,83
12	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disiapkan	3 laporan	3 laporan	100	10.280.000	10.134.900	98,59
13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/s emesteran yang disiapkan	13 laporan	13 laporan	100	37.562.400	37.294.200	99,29

No	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
III.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%	100%		144.150.176	143.007.646	99,21
14	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Usulan RKBMD Pengadaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan serta Perhitungan Standar Kebutuhan yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	100	1.837.044	1.835.300	99,91
15	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Asuransi Barang Milik Daerah	12 unit	12 unit	100	108.400.000	107.283.146	98,97
16	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah (Inventaris Barang Semesteran, Tahunan dan Audited)	4 dokumen	4 dokumen	100	14.357.132	14.350.200	99,95
17	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumah dokumen laporan barang milik daerah	1 dokumen	1 dokumen	100	19.556.000	19.539.000	99,91

No	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%		83.720.032	83.312.550	99,51
18	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	87 Stel	87 Stel	100	65.250.000	64.902.000	99,47
19	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	2 Kali	2 Kali	100	12.566.032	12.520.550	99,64
20	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan dan diikuti	2 Kali	2 Kali	100	5.904.000	5.890.000	99,76
21	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	-	-		-	-	
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%		2.194.214.397	2.118.225.750	96,54

No	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
22	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	25 Jenis	25 Jenis	100	19.919.000	19.914.200	99,98
23	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 jenis	12 jenis	100	777.030.504	718.704.370	92,49
24	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	20 jenis	20 jenis	100	37.718.300	37.492.700	99,40
25	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	81 Jenis	81 Jenis	100	305.132.020	292.517.580	95,87
25	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	10 jenis	10 jenis	100	17.622.353	17.622.250	100,00
26	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	6 jenis	6 jenis	100	10.501.920	10.500.000	99,98
27	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang dilayani	orang	orang	100	-	-	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
28	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	1 Laporan	1 Laporan	100	766.290.300	761.474.650	99,37
29	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	- Jumlah Tenaga IT yang dimanfaatkan. - Jumlah Aplikasi/Modul yang dikembangkan.	4 Orang	4 Orang	100	260.000.000	260.000.000	100,00
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100%	100%		104.771.400	100.979.000	96,38
	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	3 jenis	3 jenis	100	104.771.400	100.979.000	96,38
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya baru		-		-	-	-
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%		1.606.274.999	1.590.113.744	98,99

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat- surat keluar dalam 1 tahun	4800 Surat	4800 Surat	100	7.500.000	7.500.000	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan. - Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan. - Jumlah tagihan lisensi zoom meeting yang dibayarkan	2550 meter kubik 100 mbps 12 bulan 245000 KVA 8 rekening	2550 meter kubik 100 mbps 12 bulan 245000 KVA 8 rekening	100	704.855.000	694.540.939	98,54
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	24 orang	24 orang	100	893.919.999	888.072.805	99,35
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	100%		511.717.250	503.108.991	98,32

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit	1 unit	100	37.271.000	37.088.864	99,51
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	10 unit	10 unit	100	186.500.000	182.734.127	97,98
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54 unit	54 unit	100	74.400.000	72.300.500	97,18
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	1 unit	1 unit	100	178.736.250	178.606.000	99,93
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara/direhab	42 unit	42 unit	100	34.810.000	32.379.500	93,02

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
B	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	80%	80%		2.549.446.189	2.533.415.648	99,37
IX	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundangan	3 dokumen	3 dokumen	100	1.365.724.408	1.360.815.026	99,64
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	1 dokumen	100	14.828.100	14.755.400	99,51

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	- Jumlah Dokumen Hasil Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya. - Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah Pelaksanaan SDGs 2021-2026	1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	100	58.238.000	57.630.300	98,96
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Dokumen Berita Acara Konsultasi publik yang dilaksanakan	1 dokumen Berita Acara	1 dokumen Berita Acara	100	88.544.000	88.209.100	99,62
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100	-	-	-
	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Dokumen Berita Acara Musrenbang Provinsi yang dilaksanakan	1 dokumen Berita Acara	1 dokumen Berita Acara	100	292.042.400	290.543.800	99,49

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun dan ditetapkan.	4 dokumen	4 dokumen	100	912.071.908	909.676.426	99,74
X	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	4 dokumen	4 dokumen		394.348.220	392.049.372	99,42
	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisa Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100	217.525.950	216.761.372	99,65
3	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	1 dokumen	1 dokumen	100	61.615.450	61.218.700	99,36

No	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
4	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Pembangunan Daerah Kab/Kota yang mendukung Indikator Pembangunan Provinsi	1 dokumen	1 dokumen	100	47.599.098	47.355.700	99,49
5	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100	67.607.722	66.713.600	98,68
XI	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	75%	75%		789.373.561	780.551.250	98,88

No	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	2 dokumen	2 dokumen	100	90.508.071	86.896.100	96,01
	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Laporan hasil pengendalian pelaksanaan kerjasama daerah	-	-		-	-	-
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	3 laporan	3 laporan	100	53.028.090	51.635.050	97,37
	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang difasilitasi/evaluasi	72 dokumen	72 dokumen	100	645.837.400	642.020.100	99,41

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
C	Program Koordinasi dan Sikronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD provinsi dengan Renstra SKPD Provinsi, RKPD Provinsi dengan Renja SKPD provinsi dan RPJMD provinsi dengan RKPD provinsi	85%	85%		6.917.313.693	6.517.840.470	94,23
XII	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	3 dokumen	3 dokumen		1.627.533.710	1.574.451.740	96,74

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	3 dokumen	3 dokumen	100	176.643.250	174.030.443	98,52
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Pemerintahan	5 rumusan	5 rumusan	100	208.426.000	208.140.900	99,86
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	100	6.654.150	6.440.050	96,78

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
1	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Pemerintahan	1 laporan	1 laporan	100	46.619.250	45.885.050	98,43
2	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 dokumen	3 dokumen	100	312.591.110	288.627.769	92,33
3	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Pembangunan Manusia	5 rumusan	5 rumusan	100	522.960.000	503.708.800	96,32

No	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
4	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	100	17.566.500	15.914.500	90,60
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Pembangunan Manusia	1 laporan	1 laporan	100	336.073.450	331.704.228	98,70

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
XIII	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	3 dokumen	3 dokumen		985.864.535	977.464.605	99,15
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	3 dokumen	3 dokumen	100	185.483.000	182.101.912	98,18
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Perekonomian	5 rumusan	5 rumusan	100	210.339.550	210.274.250	99,97

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	100	10.636.550	10.513.600	98,84
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Perekonomian	1 laporan	1 laporan	100	85.163.900	84.603.196	99,34
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	3 dokumen	3 dokumen	100	246.671.485	244.766.997	99,23

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang SDA.	5 rumusan	5 rumusan	100	215.280.000	213.751.400	99,29
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan	100	12.894.000	12.576.900	97,54
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang SDA	1 laporan	1 laporan	100	19.396.050	18.876.350	97,32

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
XIV	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	3 dokumen	3 dokumen		4.303.915.448	3.965.924.125	92,15
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	3 dokumen	3 dokumen	100	209.539.118	206.909.750	98,75
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Infrastruktur.	5 rumusan	5 rumusan	100	219.500.000	219.078.200	99,81

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	100	13.599.400	13.196.000	97,03
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas bidang Infrastruktur	1 laporan	1 laporan	100	3.552.003.630	3.224.071.383	90,77
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	3 dokumen	3 dokumen	100	194.541.200	190.044.792	97,69

No	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Kewilayahan	5 rumusan	5 rumusan	100	86.313.250	85.114.950	98,61
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.	1 Laporan.	1 Laporan	100	8.505.800	8.063.150	94,80
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	100	19.913.050	19.445.900	97,65

Tabel 2.3
Permasalahan dan Upaya Mengatasi Pemasalahan Masing-Masing
Program/Kegiatan

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4
1.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		
1.1	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA		
a.	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD).	Eksternal: - Keterbatasan data untuk penyusunan dokumen perencanaan - Ketidaksinkronan antardokumen perencanaan - Keterlambatan pengesahan DPA, penetapan pengelolaan kegiatan Internal: - Tidak konsisten terhadap kalender perencanaan - Minimnya SDM perencana	- Tersedianya form Rencana Aksi Pengendalian Internal - Dilakukannya rapat pengendalian dan evaluasi triwulan
b.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Eksternal: - Minimnya pemahaman OPD terhadap RKPD - Tidak adanya tindak lanjut hasil verifikasi oleh OPD terkait Internal: - Adanya tim pembahas yang tidak lengkap - Minimnya SDM perencana	- Tersedianya form Rencana Aksi Pengendalian Internal - Dilakukannya rapat pengendalian dan evaluasi triwulan

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
c.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Eksternal: - Kurangnya pemahaman OPD terhadap tahapan perencanaan - Tidak adanya penyampaian laporan secara berkali dari OPD terkait program kegiatan teknis di masing-masing OPD Internal: - Kurangnya pemahaman terhadap substansi dan instrumen monev - Ketidakkonsistenan terhadap kalender perencanaan - Minimnya SDM perencana	- Tersedianya instrument monev sesuai substansi perencanaan pembangun - Dilakukannya rapat monev dengan OPD terkait - Dilakukannya monev lapangan secara terpadu
d.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Eksternal: - Tidak konsisten dan komitmen OPD terkait pelaksanaan rencana aksi program unggulan pemerintah provinsi dan program prioritas nasional yang telah dibuat Internal: - Minimnya SDM perencana	- Tersedianya form Rencana Aksi Pengendalian Internal. - Dilakukannya rapat pengendalian dan evaluasi triwulan
e.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Eksternal: - Keterbatasan data untuk penyusunan dokumen perencanaan - Ketidaksinkronan antardokumen perencanaan - Keterlambatan pengesahan DPA, penetapan pengelolaan kegiatan Internal: - Tidak konsisten terhadap kalender perencanaan - Minimnya SDM perencana	- Tersedianya form Rencana Aksi Pengendalian Internal - Dilakukannya rapat pengendalian dan evaluasi triwulan
f.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Eksternal: - Minimnya pemahaman OPD terhadap RKPD - Tidak adanya tindak lanjut hasil verifikasi oleh OPD terkait	- Tersedianya form Rencana Aksi Pengendalian Internal - Dilakukannya rapat pengendalian dan evaluasi triwulan

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Internal: - Adanya tim pembahas yang tidak lengkap - Minimnya SDM perencana	
g.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Eksternal: - Kurangnya pemahaman OPD terhadap tahapan perencanaan - Tidak adanya penyampaian laporan secara berkali dari OPD terkait program kegiatan teknis di masing-masing OPD Internal: - Kurangnya pemahaman terhadap substansi dan instrumen monev - Ketidakkonsistenan terhadap kalender perencanaan - Minimnya SDM perencana	- Tersedianya instrument monev sesuai substansi perencanaan pembangunan - Dilakukannya rapat monev dengan OPD terkait Dilakukannya monev lapangan secara terpadu
h.	Koordinasi Pelaksanaan Sibergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Eksternal: - Tidak konsisten dan komitmen OPD terkait pelaksanaan rencana aksi program unggulan pemerintah provinsi dan program prioritas nasional yang telah dibuat Internal: Minimnya SDM perencana	- Tersedianya form Rencana Aksi Pengendalian Internal. Dilakukannya rapat pengendalian dan evaluasi triwulan

2.2 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat adalah strategi dan arah kebijakan Bappeda untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan arah kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Strategi dan arah kebijakan jangka menengah Bappeda menunjukkan bagaimana cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Bappeda. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Bappeda dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Sebagaimana yang telah dituangkan dalam Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, maka kebijakan strategis yang diterapkan dalam kinerja tahun 2021 adalah sebagaimana tercermin pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Kebijakan Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1.	Mengoptimalkan Pelaksanaan Forum OPD, Konsultasi Publik serta Musrenbang	1. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas
2.	Meningkatkan sinergitas dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan		
3.	Mengoptimalkan Penerapan Integrasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan		
4.	Pembinaan teknis penyusunan dokumen perencanaan sesuai penajaman indikator sesuai bidang urusan		
5.	Peningkatan kualitas Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah	2. Peraturan Daerah provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026	

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
6.	Penerapan Kerangka Belanja Kegiatan dalam Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)		
7.	Pemanfaatan Data dan Informasi yang Valid, mudah diakses dan Mutakhir berbasiskan Satu Data		

a. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Terhadap rekomendasi DPRD, Pansus LKPJ, dan Fraksi atas LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat telah ditindaklanjuti dengan kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan Pada Tahun anggaran 2021, dengan rincian sebagai berikut :

a. Tindak Lanjut rekomendasi DPRD

Tabel 2.5
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
TEMA DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH			
1	Ke depan Program, kegiatan dan alokasi anggaran untuk masing-masing OPD dan urusan, harus sejalan dengan tema dan arah kebijakan pembangunan daerah yang telah ditetapkan, agar terdapat keselarasan antara sasaran dan target yang akan diwujudkan dengan program, kegiatan dan alokasi anggaran yang akan dilaksanakan	Konsisten terhadap tahapan dan mekanisme perencanaan dan penganggaran sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	Program, kegiatan dan alokasi anggaran untuk masing-masing OPD dan urusan selaras dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
2	Pemerintah Daerah harus konsisten dalam perumusan program, kegiatan dan alokasi anggaran dengan perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan		
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Per Urusan			
Urusan Pendukung Pemerintahan Daerah			
1	Penyusunan program, kegiatan dan alokasi anggaran masing-masing urusan dan masing-masing OPD, harus sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan serta memperhatikan capaian sasaran dan target dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya	Konsisten terhadap tahapan dan mekanisme perencanaan dan penganggaran sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	Program, kegiatan dan alokasi anggaran untuk masing-masing OPD dan urusan selaras dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.
TUGAS PEMBANTUAN			
1	Pelaksanaan tugas pembantuan harus disinergikan dengan program dan kegiatan yang dibiaya dari APBD, sehingga terdapat percepatan dalam pencapaian target kinerja RPJMD	- Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan pasal 1 ayat 11 bahwa Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan dan ayat 15 yang menyatakan bahwa Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua	Percepatan pencapaian target nasional yang diselaraskan dengan target daerah.

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
		penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. - Ketentuan dalam pembiayaan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi sepenuhnya ditetapkan oleh Kementerian melalui Juklak dan Juknis kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah - Melakukan koordinasi, integrasi, sinergitas dan sinkronisasi program dan kegiatan dengan Kementerian/Lembaga terkait sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.	

b. Tindak lanjut Rekomendasi Pansus LKPJ

Tabel 2.6
Tindak Lanjut Rekomendasi Pansus LKPJ DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

No	Rekomendasi Pansus LKPJ Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
	Ke depan Program, kegiatan dan alokasi anggaran untuk masing-masing OPD dan urusan, harus sejalan dengan tema dan arah kebijakan pembangunan daerah yang telah ditetapkan, agar terdapat keselarasan antara sasaran dan target yang akan diwujudkan dengan program, kegiatan dan alokasi anggaran yang akan dilaksanakan	Konsisten terhadap tahapan dan mekanisme perencanaan dan penganggaran sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	Program, kegiatan dan alokasi anggaran untuk masing-masing OPD dan urusan selaras dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.

No	Rekomendasi Pansus LKPJ Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
	Pemerintah Daerah harus konsisten dalam perumusan program, kegiatan dan alokasi anggaran dengan perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan		
Makro Ekonomi Daerah			
	Tidak tercapainya beberapa kondisi makro daerah, tentu tidak terlepas dari wabah pandemic covid-19 yang muncul pada awal bulan Februari 2021 yang sangat berdampak terhadap hampir semua sektor kehidupan, terutama sektor kesehatan dan ekonomi.	Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan semua sektor kehidupan terutama kesehatan dan ekonomi, dengan sasaran yaitu : 1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 2. Menurunkan prevelansi stunting 3. Meningkatkan kualitas pendidikan 4. Meningkatkan daya saing masyarakat 5. Meningkatkan pendapatan petani pertanian dan hutan 6. Meningkatkan ketahanan dan keamanan pangan 7. Menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan, industri kecil dan menengah 8. Mensejahterakan pelaku koperasi dan UKM 9. Menciptakan 1000 Enterpreneur dari berbagai sektor 10. Meningkatkan pertumbuhan investasi 11. Meningkatkan peran ekonomi digital 12. Meningkatkan kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif dalam	

No	Rekomendasi Pansus LKPJ Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
		perekonomian	
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Per Urusan			
	Penyusunan program, kegiatan dan alokasi anggaran masing-masing urusan dan masing-masing OPD, harus sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan serta memperhatikan capaian sasaran dan target dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya	Konsisten terhadap tahapan dan mekanisme perencanaan dan penganggaran sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	Program, kegiatan dan alokasi anggaran untuk masing-masing OPD dan urusan selaras dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.
Capaian Kinerja Tugas Pembantuan dan Penugasan			
	Tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat ini sangat membantu Provinsi Sumatera Barat dalam percepatan pembangunan daerah. Oleh sebab itu, program dan kegiatan yang bersumber dari tugas pembantuan harus diselaraskan dengan program dan kegiatan yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat.	- Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan pasal 1 ayat 11 bahwa Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan dan ayat 15 yang menyatakan bahwa Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran	Percepatan pencapaian target nasional yang diselaraskan dengan target daerah.

No	Rekomendasi Pansus LKPJ Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
		dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. - Ketentuan dalam pembiayaan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi sepenuhnya ditetapkan oleh Kementerian melalui Juklak dan Juknis kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah - Melakukan koordinasi, integrasi, sinergitas dan sinkronisasi program dan kegiatan dengan Kementerian/Lembaga terkait sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.	

c. Tindak Lanjut Rekomendasi Fraksi

Tabel 2.7
Tindak Lanjut Rekomendasi Fraksi DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

No	Rekomendasi Fraksi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
FRAKSI GOLKAR			
1.	Secara keseluruhan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, akan tetapi tindak lanjut rekomendasi banyak yang tidak fokus. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah tidak sungguh-sungguh melaksanakan dan menindaklanjuti rekomendasi DPRD	Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan alat dalam penciptaan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan itu, wajib bagi Pemerintah Daerah dan DPRD untuk saling berkoordinasi dan bersinkronisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Sehingga, Pemerintah Daerah berfokus dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan dan menindaklanjuti hasil rekomendasi DPRD terhadap	

No	Rekomendasi Fraksi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
		LKPJ	
FRAKSI PPP-NASDEM			
1.	Rekomendasi-rekomendasi yang di berikan oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat, agar dapat ditindak lanjuti oleh Kepala Daerah dan OPD terkait dan dijadikan bahan dalam perbaikan dokumen perencanaan pembangunan daerah, penyusunan RKPD dan penyusunan Rancangan APBD Provinsi Sumatera Barat yang akan datang.	Rekomendasi-rekomendasi yang di berikan oleh DPRD terhadap LKPJ, akan ditindak lanjuti dan dijadikan bahan dalam perbaikan dokumen perencanaan pembangunan daerah, penyusunan RKPD dan penyusunan Rancangan APBD Provinsi Sumatera Barat yang akan datang	
2.	Fraksi PPP-NasDem menegaskan kembali agar seluruh OPD dan seluruh rekomendasi, saran, masukan dan kritikan yang bersifat objektif yang telah disampaikan Pansus DPRD untuk dapat menjadi masukan dan untuk ditindak lanjuti.	Seluruh rekomendasi, saran, masukan dan kritikan yang bersifat objektif yang telah disampaikan Pansus DPRD akan menjadi masukan dan saran untuk ditindak lanjuti oleh seluruh OPD Provinsi Sumatera Barat	
FRAKSI PKS			
1.	Ke depan Program, kegiatan dan alokasi anggaran untuk masing-masing OPD dan urusan, harus sejalan dengan tema dan arah kebijakan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Distribusi alokasi anggaran untuk masing-masing OPD harus disesuaikan dengan beban tugas masing-masing OPD dalam mewujudkan sasaran dan target kinerja pembangunan daerah.	Konsisten terhadap tahapan dan mekanisme perencanaan dan penganggaran sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	Program, kegiatan dan alokasi anggaran untuk masing-masing OPD dan urusan selaras dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.

No	Rekomendasi Fraksi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
2.	Pemerintah Daerah bersama DPRD harus konsisten dalam perumusan program, kegiatan dan alokasi anggaran dengan perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan		
PAN			
1.	Dengan belum terwujudnya perencanaan yang terdapat dalam 10 program prioritas dengan sendirinya banyak pekerjaan dan kegiatan yang belum sudah atau terbengkalai dari segala sector, apalagi di hantam oleh badai pandemi covid 19 yang mencedarai seluruh program dan kegiatan yang di laksanakan tahun anggaran 2020 maka semestinya kepala daerah terpilih harus mensinkronisasikan dengan program unggulan yang di rencanakan serta menkoordinasikan seluruh kegiatan yang belum terlaksana pada kepala daerah sebelumnya.	Program unggulan yang direncanakan, disusun berdasarkan permasalahan dan isu yang dihadapi dan sedang berkembang saat ini, serta kemungkinan yang akan dihadapi pada masa yang akan datang Program unggulan juga mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang diselaraskan dengan visi dan misi RPJPD 2005-2025 serta visi dan misi RPJMN 2020-2024 Program unggulan tersebut adalah mewujudkan Sumatera Barat yang: 1. Sehat dan cerdas 2. Religius dan berbudaya 3. Sejahtera 4. Berkeadilan	

No	Rekomendasi Fraksi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
2.	Pemerintahan daerah sebagaimana yang di sebut oleh laporan pansus LKPJ harus mengalokasikan anggaran kepada OPD sesuai dengan beban kerja yang di perintahkan kepadanya, jangan beban kerja tidak sesuai dengan anggaran yang di berikan dan harus terjadi pengawasan internal yang objektif selain pengawasan eksternal.	Konsisten terhadap tahapan dan mekanisme perencanaan dan penganggaran sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	Program, kegiatan dan alokasi anggaran untuk masing-masing OPD dan urusan selaras dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.
3.	Secara keseluruhan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ 2019 memang sudah dilaksanakan oleh pemerintahan daerah, tetapi pelaksanaan rekomendasi banyak yang tidak focus, tidak terukur dan tidak dijabarkan dalam perencanaan pembangunan dan rencana anggaran akibatnya permasalahan yang sama kembali terjadi pada tahun anggaran selanjutnya, arah kebijakan pembangunan daerah belum dilaksanakan sepenuhnya, dapat di lihat dengan penyusunan program kegiatan pembangunan belum sesuai dengan tema ditetapkan pada RKPD dan RPJMD 2021 - 2026	RKPD Tahun 2022 dan RPJMD 2021-2026 disusun berdasarkan permasalahan dan isu yang dihadapi dan sedang berkembang saat ini, serta kemungkinan yang akan dihadapi pada masa yang akan datang Sesuai dengan Surat Edaran Kemendagri Nomor 640/16/SJ tanggal 4 Januari 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, disebutkan bahwa : 1. RKPD Provinsi Tahun 2022 disusun berpedoman pada RPJPD Provinsi 2005-2025, mempertimbangkan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih hasil pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020, serta memperhatikan RKPD Tahun 2022. 2. RPJMD disusun berdasarkan visi, misi dan program kepala daerah	

No	Rekomendasi Fraksi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
		terpilih Tahun 2020 dengan berpedoman pada RPJPD 2005-2025, RPJMN 2020-2024, RPJMD Teknokratik dan KLHS RPJMD, serta Kepmendagri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	

2.4 Penghargaan Yang Diterima

Dalam penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, penghargaan yang diterima selama Tahun 2021 adalah Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Peringkat I Tingkat Nasional. Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) merupakan salah satu bentuk evaluasi pembangunan daerah yang dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Tujuan pemberian penghargaan dimaksudkan untuk memberi apresiasi kepada pemerintah daerah yang maenunjukkan prestasi terbaik dalam penyusunan dokumen perencanaan, pencapaian dan inovasi pembangunan daerah.

Penyerahan Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2021 Oleh Menteri PPN/Bappenas kepada Gubernur Sumatera Barat



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI

3.1 URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS PEMBANTUAN

1. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Diatasnya

Dana Dekonsentrasi yang diterima oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2021 berasal dari Kementerian PPN/Bappenas dimaksudkan menyelenggarakan tugas dibidang perencanaan pembangunan nasional serta menyelenggarakan fungsi yang mencakup antara lain perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan pembangunan nasional. Dalam kaitan penyelenggaraan tugas dan fungsi tersebut serta peningkatan kualitas dari perencanaan nasional, dibutuhkan adanya perkuatan koordinasi antar lembaga perencana yaitu antara Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga perencana pusat dengan Bappeda sebagai lembaga perencana di daerah. Diharapkan melalui Dana Dekonsentrasi dapat memperkuat koordinasi antar lembaga perencanaan pusat dan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan nasional.

Pada tahun 2021 Dana Dekonsentrasi yang diterima oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada berasal dari Kementerian PPN/Bappenas melalui Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP.DIPA-055.01.3.0800019/2021 dengan pagu dana sebesar Rp. 958.891.000,- yang dikelola Satuan Kerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Namun belum berakhirnya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terpuruknya perekonomian di Indonesia, pemerintah dengan seksama mengambil kebijakan untuk merasionalisasi APBN Tahun 2021. Rasionalisasi ini berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-584/MK.02/2021 perihal Refocusing dan Relokasi Belanja Kemenreian PPN/Bappenas pada tanggal 8 Juli 2021 dan Surat Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana Kementerian PPN/Bappenas Nomor 08590/KU.01.03/B.04/T/07/2021 TANGGAL 15 Juli 2021 perihal Penyampaian Rencana Refocussing Anggaran satker Dana Dekonsentrasi TA. 2021. Pagu anggaran yang sebelumnya Rp. 958.891.000,- dirasionalisasikan menjadi Rp. 208.969.000,-. Beberapa kegiatan yang dirasionalisasikan untuk tidak dilaksanakan seperti Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Data daerah Provinsi Sumatera Barat dan Nasional berbagi Pakai dalam Rencana Aksi Satu Data Indonesia.

Sampai dengan akhir kinerja Tahun 2021, Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021, 6 (enam) kegiatan yang diamanahkan pada Satker Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah selesai dilaksanakan 100 % dengan serapan anggaran sebesar 95,49% atau sebesar Rp. 199.540.600,- dari total anggaran sebesar Rp. 208.969.000,-. Serapan anggaran berdasarkan masing-masing jenis belanja yang tercantum pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.1
Realisasi Serapan Anggaran Dekonsentrasi
sampai dengan Semester 2 Tahun 2021

Kode	Program/Kegiatan/Output/ Sub Output/Komponen/Sub Komponen/Akun/Detail	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi	Sisa (Rp.)
01.06	Program Perencanaan Pembangunan Nasional	208.969.000	199.540.600	95,49	9.428.400
5246	Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang		-	-	
1	Penguatan Perencanaan Daerah dalam Koridor Prioritas Nasional	93.109.000	92.809.000	99,68	300.000
a	Penyelarasan indikator makro dan program (indikator dan target) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 serta RKP dengan RKPD	1.000.000	1.000.000	100	-
1)	Sosialisasi Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional di Provinsi Sumatera Barat dalam RPJMN 2020 -2024	500.000	500.000	100	-
521211	Belanja Bahan	500.000	500.000	100	-
522151	Belanja Jasa Profesi	-	-	-	-
2)	Bimbingan Teknis dan Pendampingan Penyelarasan Isu Strategis, Indikator dan Target RKP 2022 dengan RKPD Tahun 2022	500.000	500.000	100	-
521211	Belanja Bahan	500.000	500.000	100	-
521213	Honor Output Kegiatan	-	-	-	-
522151	Belanja Jasa Profesi	-	-	-	-
524111	Belanja Perjalanan Dinas	-	-	-	-
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-	-
b	Sinkronisasi daftar data dan/atau Rencana Aksi Satu Data Indonesia	-	-	-	-
1)	Rapat Koordinasi dan	-	-	-	-

Kode	Program/Kegiatan/Output/ Sub Output/Komponen/Sub Komponen/Akun/Detail	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi	Sisa (Rp.)
	Sinkronisasi Data Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Berbagi Pakai Dalam Rencana Aksi Satu Data Indonesia				
521211	Belanja Bahan	-	-	-	-
521213	Honor Output Kegiatan	-	-	-	-
522151	Belanja Jasa Profesi	-	-	-	-
524111	Belanja Perjalanan Dinas	-	-	-	-
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-	-
c	Pengisian Aplikasi KRISNA – SELARAS, Aplikasi KRISNA DAK, pembahasan Kerangka Ekonomi Makro Regional, dan strategi pengembangan wilayah dalam rangka mendukung penyiapan bahan Rakorgub, Rakortek, dan Musrenbang	7.395.000	7.395.000	100,00	-
1)	Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Bahan dan Keikutsertaan Dalam Acara Rakorgub, Rakortek, Musrenbang dan Musrenbangnas	7.395.000	7.395.000	100,00	-
521211	Belanja Bahan	7.395.000	7.395.000	100,00	-
522151	Belanja Jasa Profesi	-	-	-	-
524111	Belanja Perjalanan Dinas	-	-	-	-
d	Penyusunan/Evaluasi RPJMD, Renstra dan Renja OPD Propinsi/Kabupaten/ Kota dalam rangka mendukung keselarasan dan pencapaian prioritas nasional	500.000	500.000	100	-
1)	Bimtek dan Pendampingan Penyusunan Renstra dan Renja OPD Provinsi dan Kab/Kota se Sumatera Barat dengan RPJMD dan memperhatikan Renstra Kementerian dan Lembaga dalam rangka mendukung keselarasan dan pencapaian prioritas nasional	500.000	500.000	100	-
521211	Belanja Bahan	500.000	500.000	100	-

Kode	Program/Kegiatan/Output/ Sub Output/Komponen/Sub Komponen/Akun/Detail	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi	Sisa (Rp.)
521213	Honor Output Kegiatan	-	-	-	-
522151	Belanja Jasa Profesi	-	-	-	-
524111	Belanja Perjalanan Dinas	-	-	-	-
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-	-
e	Penyusunan/Evaluasi RKPD dalam rangka mendukung keselarasan dengan prioritas nasional mendukung penyiapan bahan Rakorgub, Rakortek, dan Musrenbang	84.214.000	83.914.000	99,64	300.000
1)	Evaluasi Keselarasan RKPD Kab/Kota dan RKPD Provinsi Dalam Mendukung Keselarasan Dengan Prioritas Nasional Tahun 2021	84.214.000	83.914.000	99,64	300.000
521211	Belanja Bahan	36.654.000	36.654.000	100,00	-
521213	Honor Output Kegiatan	3.850.000	3.550.000	92,21	300.000
522151	Belanja Jasa Profesi	28.300.000	28.300.000	100,00	-
524111	Belanja Perjalanan Dinas	15.410.000	15.410.000	100,00	-
2	Fasilitasi Kesekretariatan Dekonsentrasi di Provinsi	115.860.000	106.731.600	92,12	9.128.400
521213	Honor Output Kegiatan	64.800.000	56.680.000	87,47	8.120.000
521211	Belanja Bahan	18.250.000	18.250.000	100,00	-
524111	Belanja Perjalanan Dinas	32.810.000	31.801.600	96,93	1.008.400

3.2 HAMBATAN/ PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN

Dalam pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi tahun 2021 sampai dengan kondisi Desember Tahun 2021 tidak ditemui kendala yang berarti. Sesuai dengan DIPA Nomor : SP DIPA-055.01.3.080019/2021 tanggal 23 November 2020 yang selanjutnya direvisi menjadi DIPA Nomor : SP DIPA-055.01.3.080019/2021 tanggal 29 Juli 2021, kegiatan yang diamanatkan pada Satker Bappeda Provinsi Sumatera Barat sebanyak 6 kegiatan telah selesai dilaksanakan dengan baik.

BAB IV PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Barat Akhir Tahun Anggaran 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan cukup optimal meskipun terjadi bencana non alam Pandemi COVID-19, merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh elemen pemerintahan yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2021 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang. Disamping itu pelaksanaan pembangunan Tahun 2021 dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan Sumatera Barat pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Barat Akhir Tahun Anggaran 2021, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat.

Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua.